

JERUJI DI TANAH



SENDIRI

PERLAWANAN NAGARI DALAM KEPUNGAN
ENERGI DAN KEKUASAAN

Jeruji Di Tanah Sendiri

Perlawanan Nagari dalam Kepungan Energi dan Kekuasaan

LAPORAN *OUTCLASS* KALABAHU 2025



Jeruji di Tanah Sendiri

Perlawanan Nagari dalam Kepungan Energi dan Kekuasaan

Penerbit :

LBH Padang

Penanggungjawab :

Diki Rafiqi

Dewan Redaksi :

Alfi Syukri

Uzika Putri Fatasa

Mhd. Faruq Anrusfi

Muhammad Soutan Joefriedan

Ahli Bahasa :

Meiliza Delviyanti

Habieb Aulia Sufi

Editor :

Hendra Makmur

Penulis :

Ady Fakhrol Rozi

Anisa Maharani

Amelia Lestari

Bonar

Dita Indriani Siregar

Fadhilatul Husni

Fitria Deswika

Jenny Noviantri

Lidya Dwi Utami

Nurul Qoriatul Fadila

Mhd. Qori Al- Karim

Zahra Nurul Aulia

Desain Sampul dan Penata Letak :

Zahra Nurul Aulia

Cetakan, **Maret 2026**

Alamat Redaksi :

Jln. Pekanbaru No. 21 Asratek, Ulak Karang, Padang 25135

Telp. 0751-7051750, Fax. 0751-7056059

Email : lbhpadang@yahoo.co.id

Website : www.lbhpadang.com

Instagram : lbh_padang



DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

Ketenangan yang Mencekam	7
Palagan Sunyi di Batu Bajanjang: Saat Investasi Memutus Tali Darah.....	13
Di Kaki Gunung Talang, Jeruji Bukan Akhir Segalanya	17
Ruang Hidup Dalam Bayang-bayang Geothermal	23

BAB III

Bangkai Berbalut Madu di Batas Tiga Negeri	35
Di Balik Jeruji Tanah Sendiri, Ironi Petani Kapa yang Menanti Keadilan	43

BAB IV

Langit Kelabu di Pesisir	51
--------------------------------	----

BAB V

BAB I

BENANG MERAH

Sumatera Barat bak sebuah rumah gadang yang sedang dikepung oleh badai ekstraktivisme. Dari lereng Gunung Talang hingga kaki Tandikek-Singgalang, dari hamparan rimba hingga pesisir Kota Padang, ruang hidup masyarakat sedang diiris secara perlahan. Kita menyaksikan satu pola yang terlalu konsisten untuk disebut sebagai kebetulan: proyek-proyek datang dengan wajah legal dan bahasa kemajuan, namun meninggalkan residu sosial, ekologis, dan psikologis yang tak pernah sungguh dihitung sebagai biaya pembangunan.

Menghadapi daya rusak ekstraktivisme yang masif tersebut, LBH Padang menolak untuk sekadar menjadi penonton. Berpegang teguh pada komitmen penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga ini memilih untuk hadir dan berdiri tegak bersama masyarakat. Kami Padang meyakini bahwa nafas perjuangan tidak boleh terputus; ia harus terus diregenerasikan dan diwariskan. Oleh karena itu, bagi setiap

individu yang melangkah masuk ke pintu LBH Padang, mereka harus menjalani kawah candradimuka bernama Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Sebagai langkah pertama regenerasi pejuang HAM, mereka tidak sekadar belajar dari teks hukum, melainkan langsung turun gelanggang, melebur, dan hidup bersama masyarakat yang sedang dihantam badai krisis.

Dari proses *live-in* dan belajar bersama rakyat itulah, lahir buku ini. Buku ini tidak sekadar merangkum pengalaman kawan-kawan peserta KALABAHU 2025. Lebih dari itu, buku ini membaca pola ketidakadilan. Pola tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan selalu dihadirkan sebagai sebuah "keniscayaan", sementara penolakan rakyat diposisikan secara sepihak sebagai "deviasi" (penyimpangan).

Lihatlah bagaimana proyek ini bekerja di tapak. Di Batu Bajaranjang, penetapan wilayah kerja panas bumi menggeser makna gunung dari "Pasak Bumi" menjadi sekadar cadangan energi. Di Pandai Sikek, keindahan kaki gunung dibaca murni sebagai potensi eksploitasi. Di Tapan dan Kapa, tanah ulayat yang diwariskan turun-temurun berubah wujud menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang haram disentuh oleh pemilik asalnya. Sementara di Bungus, terangnya listrik untuk kota harus dibayar lunas dengan kepungan debu batubara yang dihirup warga setiap hari. Kasus-kasusnya mungkin berbeda lokasi, komoditas, maupun aktor teknis. Namun, struktur relasinya serupa: keputusan yang *top-down*, minimnya partisipasi, ketimpangan kuasa, dan respons aparat keamanan saat konflik membesar.

Hal yang harus digarisbawahi secara kritis adalah konflik-konflik ini bukan sekadar akibat "kurangnya sosialisasi". Ini adalah produk dari model pembangunan yang secara inheren menempatkan ruang hidup sebagai objek yang bisa dinegosiasikan tanpa persetujuan bebas dan setara dari masyarakat. Musyawarah adat direduksi menjadi formalitas administratif, persetujuan warga dipersempit menjadi tanda tangan segelintir *elite*. Ketika resistensi muncul, hal itu dibingkai sebagai hambatan investasi, bukan didengarkan sebagai alarm demokrasi.

Lebih jauh, badai perampasan ruang ini tidak selalu meledak keras di jalanan, melainkan mewujud dalam luka sosial yang mengendap secara laten. *Lapau-lapau* yang tadinya menjadi ruang silaturahmi yang hangat, kini menjadi senyap. Masjid berubah menjadi ruang konsolidasi yang saling dicurigai. *Niniak Mamak* tempat berlindung kehilangan marwah di tengah himpitan tekanan politik dan ekonomi korporasi. Ketenangan yang tampak di permukaan sesungguhnya menyembunyikan fragmentasi sosial. Pada titik ini, hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi instrumen disiplin dan kriminalisasi. Ini bukan lagi sekadar konflik agraria atau energi; ini adalah penyempitan ruang demokratis secara nyata di akar rumput.

Simpul utama yang mengikat seluruh ketidakadilan ini terletak pada pertarungan definisi atas 'kepentingan umum. Apakah kepentingan umum identik dengan Proyek Strategis Nasional? Apakah proyek-proyek tersebut otomatis mewakili suara nelayan kecil, petani hortikultura, atau kaum

ibu (Bundo Kandung) pemegang hak ulayat? Ataukah kepentingan umum telah direduksi menjadi ambisi makro yang mengorbankan nyawa di ranah mikro? Jika pertanyaan ini diabaikan, maka setiap izin baru hanya akan menjadi babak baru dari penindasan yang sama, dan melahirkan "damai semu" yang rapuh.

Melalui catatan *live-in* pada bab-bab berikutnya, buku ini mengambil posisi yang tegas: pembangunan tidak bisa dilepaskan dari keadilan ekologis dan demokrasi partisipatif. Tanah ulayat bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan pondasi identitas. Jika negara ingin terus merapal mantra tentang transisi energi, maka yang harus ditransisikan bukan hanya sumber energinya, melainkan juga cara pengambilan keputusannya. Dimulai dari sentralistik menjadi partisipatif, dari represif menjadi deliberatif, dan dari eksploitatif menjadi berkeadilan. Mari kita telusuri jalan sunyi itu bersama rakyat yang terus bertahan.

BAB II

HEGEMONI ENERGI DAN PERLAWANAN DI KAKI GUNUNG



Ketenangan yang Mencekam

Oleh: Amelia Lestari

Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat sekilas tampak tenang. Ladang pertanian tetap hijau yang dialiri air pegunungan, dan warga masih turun ke ladang seperti biasa. Namun dibalik rutinitas yang tampak normal ini, mengendap suasana “ketenangan yang mencekam” tengah menyelimuti nagari yang menjadi salah satu lumbung pangan Sumatera Barat ini.

Sejak pemerintah pusat menetapkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 27.000 hektar untuk PT Hitay Daya Energi pada 2017, kehidupan sosial di Salingka Gunung Talang perlahan terpecah. Gunung yang selama ini dihormati sebagai “pasak bumi” dan “menara air” bagi masyarakat adat Minangkabau kini berubah menjadi ruang perebutan antara ekonomi ekstraktif dan ekonomi agraris yang selama ini menghidupi warga. Di tengah perubahan itu, masyarakat dihadapkan pada ancaman hilangnya sumber mata air yang menjadi nadi irigasi ratusan hektar lahan hortikultural,

sekaligus dipaksa berhadapan dengan negara merespon penolakan mereka yang mengabaikan suara pemegang hak ulayat.

Pada 20 November 2017, ketegangan di Nagari Batu Bajanjang meledak ketika aparat bersenjata lengkap dikerahkan mengawal survei perusahaan, hingga memicu bentrokan dan pembakaran satu unit kendaraan operasional PT Hitay Daya Energi. Penanganan negara atas insiden tersebut berujung pada penangkapan dan proses peradilan terhadap tiga warga (Ayu, Edi, dan Kacak) yang dipandang sebagai bentuk kriminalisasi untuk membungkam suara penolakan terhadap proyek PLTP Gunung Talang. Sejak peristiwa itu, dinamika konflik memasuki fase baru, bukan lagi ledakan kemarahan, melainkan ketenangan yang dilipisi rasa takut dan curiga yang terus mengendap.

Pasar dan *lapau* masih berjalan seperti biasa, namun tradisi maota yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan kaku. Masyarakat berhati-hati memilih kata, menurunkan suara, dan saling mengamati sebelum berbicara. Mereka menyadari bahwa, di antara deret kursi dan gelas kopi bisa saja duduk "mata-mata kampung" tetangga yang telah berpihak pada perusahaan atau intel lokal yang ditugaskan memantau setiap langkah gerak aktivis.

Ketenangan perlahan berubah menjadi tekanan psikologis yang menyesak. Di sekitar rumah keluarga Ayu Dasril korban kriminalisasi yang menjadi basis perlawanan, masyarakat melaporkan adanya pola pengawasan yang kian intensif. Kendaraan asing tanpa plat nomor berulang kali

melintas pada jam-jam rawan, sementara orang tak dikenal memotret rumah warga tanpa memperkenalkan diri. Setiap suara mobil yang mendekat memicu refleks spontan, pintu segera dikunci rapat, percakapan mendadak dihentikan. Di ruang tamu yang senyap itulah, ketenangan berubah menjadi bentuk baru dari kekerasan, perampasan rasa aman, dan kebebasan dari rasa takut yang seharusnya dijamin oleh negara.

Di sisi lain, terjadi kerusakan sosial. Warga terbelah menjadi kubu pro dan kontra. Jaringan kekerabatan yang selama ini kokoh dalam adat matrilineal Minangkabau terkoyak oleh politik adu domba yang dimainkan perantara perusahaan. Mereka yang memilih berpihak pada perusahaan, berperan sebagai informan, perlahan dikucilkan dari ruang sosial adat. Fragmentasi ini menyakitkan, namun pada saat yang sama justru melahirkan "solidaritas luka" di antara kelompok yang memilih bertahan, terutama keluarga para korban kriminalisasi.

Namun, ketenangan yang mencekam itu tidak sepenuhnya melumpuhkan kehidupan warga. Di tengah politik ketakutan, mereka justru mengembangkan bentuk perlawanan baru yang lebih terukur. Kelompok pemuda Parik Paga Nagari kini berperan sebagai tim dokumentasi dan komunikasi cepat, merekam setiap pergerakan kendaraan asing dengan ponsel, sekaligus melakukan blokade jika keadaan memaksa. Dari rumah-rumah yang tampak biasa mereka menyusun alur komunikasi darurat yang jelas, siapa menghubungi siapa saat situasi genting, serta bagaimana informasi dijaga agar

tak bocor ke jejaring mata-mata di desa.

Di garis depan, berdiri Bundo Kandung, kaum ibu pemegang hak atas tanah ulayat dalam sistem matrilineal Minangkabau. Mereka secara sadar menempatkan tubuh sebagai pagar betis untuk menghadang aparat dan alat berat yang mencoba masuk ke wilayah Nagari. Dengan memanfaatkan beban moral aparat yang gampang menggunakan kekerasan fisik terhadap perempuan, sekaligus menegaskan bahwa pemilik sah tanah adalah mereka

Di lereng Gunung Talang, ketenangan juga menutupi ancaman ekologis. Pemetaan partisipatif warga menunjukkan bahwa patok-patok WKP (wilayah kerja panas bumi) ditancapkan tepat di kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai zona tangkapan air, jantung sistem irigasi yang menghidupi lahan pertanian di bawahnya. Dari titik rencana pengeboran, aliran air mengalir langsung menuju sawah dan ladang hortikultural, berlawanan dengan narasi "lahan tidur" yang tercantum dalam dokumen AMDAL. Di tengah fakta bahwa Batu Bajanjang dihuni petani sejahtera yang mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial maupun program CSR, proyek PLTP ini justru berpotensi memiskinkan mereka dengan merusak basis produksi utama air dan tanah yang subur.

Dalam salah satu sesi diskusi tertutup, seorang bundo kandung (tokoh perempuan) merangkul kegelisahan itu dengan kalimat:

“Aia ko darah kami. (Air ini darah kami). Kalau gunung dilubangi, mati sawah kami, mati pula anak cucu kami. Tak butuh kami ganti rugi, yang kami butuhkan air untuk hidup.”

Di balik ketenangan tutur itu, tersimpan ancaman, bagi mereka kehilangan tanah berarti kehilangan identitas, sejarah, sekaligus masa depan anak cucu.

Ini menunjukkan bahwa konflik di Gunung Talang bukan sekadar sengketa izin proyek, melainkan sebagai rangkaian sebab-akibat yang berawal dari kebijakan top-down penerbitan Izin Panas Bumi tanpa penerapan FPIC yang jujur, lalu menjalar menjadi dampak ekologis, sosial, hingga psikologis bagi warga. Patroli aparat, kriminalisasi tokoh masyarakat, dan komunikasi dengan pemerintah nagari serta kecamatan, menciptakan kondisi “damai semu” yang menutup ruang demokratis. Di permukaan, bentrokan fisik mulai mereda, tetapi di bawahnya mengalir deras rasa terancam yang kapan saja bisa memuncak, ketika tubuh warga kembali dipaksa menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan menara air kehidupan mereka.

Ketenangan di Batu Bajanjang sejatinya adalah alarm yang terus berbunyi pelan. Di balik hamparan hijau ladang dan wajah desa yang tampak baik-baik saja, hidup sebuah nagari yang berjaga, mencatat, dan melawan sambil menahan napas.



Palagan Sunyi di Batu Bajanjang: Saat Investasi Memutus Tali Darah

Oleh: Fitria Deswika

Di lereng Gunung Talang, tepatnya di nagari yang memeluk Batu Bajanjang, harmoni bukan lagi kata sifat yang tepat untuk menggambarkan kehidupan warga. Sejak PT Hitay Daya Energy mematok koordinat panas bumi di sana, sebuah garis demarkasi imajiner telah membelah kampung. Ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan perang dingin antar-saudara yang mengubah peta sosiologis Minangkabau yang biasanya egaliter menjadi fragmen-fragmen yang saling curiga.

Jika Anda berjalan di pasar atau duduk di lapau (kedai kopi) saat ini, Anda akan melihat pemandangan yang ganjil. Ada meja-meja yang tak pernah bersatu, ada sapaan yang sengaja ditelan kembali. Masyarakat telah terpolarisasi secara ekstrem menjadi dua faksi; barisan penjaga tanah ulayat dan mereka yang dianggap sebagai kaki tangan korporasi.

Bagi faksi kedua, hidup di nagari kini terasa seperti dipenjara di ruang terbuka. Di Minangkabau, sanksi sosial adalah eksekusi mati tanpa darah. Sanksi sosial itu berupa boikot dalam ritual kematian maupun hajatan pernikahan.

Saat terjadi kematian, tradisi melayat yang sakral telah menjadi senjata politik. Ketika ada anggota keluarga dari kubu pro-perusahaan yang meninggal, kesunyian yang memekakkan telinga menyambut rumah duka. Tidak ada tetangga yang datang membawa kain kafan, tidak ada tangan yang membantu menggali liang lahat. Di sini, pengkhianatan terhadap ruang hidup kolektif dibayar dengan pengabaian abadi.

Begitu juga saat terjadi pernikahan, meja perjamuan bisa kosong. Hajatan pernikahan yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi berubah menjadi monumen kesepian. Undangan disebar, namun tak ada yang sudi melangkah melewati ambang pintu rumah mereka yang dianggap telah menerima "uang sogokan."

Konflik ini juga memicu krisis kepemimpinan adat yang paling parah dalam dekade ini. Niniak Mamak dan Perangkat Nagari, yang secara tradisional dipandang sebagai pohon besar tempat bernaung, kini kehilangan marwahnya.

Karena sempat menjadi pintu masuk bagi kepentingan elit politik lokal dan korporasi pada 2017, para pemimpin ini kini laksana macan kertas. Mereka masih memegang gelar, namun kehilangan pendengar. Ketidakhadiran masyarakat dalam acara-acara adat yang mereka pimpin adalah bentuk mosi tidak percaya yang paling nyata. Rakyat kini lebih

patuh pada komando sekelompok orang yang peduli alam atau gerakan akar rumput daripada titah otoritas adat yang dianggap telah terkontaminasi kepentingan investasi.

Polarisasi ini bahkan merambah ke dalam ruang sakral. Masjid tidak lagi hanya menjadi tempat berdialog dengan Tuhan, tapi pusat komando perlawanan rakyat. Di sini, politik dan iman berkelindan.

Ketika perusahaan mencoba menggunakan masjid untuk agenda sosialisasi pada 2025, mereka melakukan kesalahan fatal. Bagi warga, membawa narasi ekstraksi ke dalam rumah ibadah adalah penajaman luka atas kriminalisasi masa lalu. Memori tentang kawan yang dipenjara karena pasal SLAPP meski tidak berada di lokasi kejadian telah membeku menjadi dendam kolektif yang sulit dicairkan dengan retorika energi bersih.

Namun, di balik retaknya kohesi sosial, lahir sebuah kekuatan baru yang lebih tangguh: redistribusi kuasa. Polarisasi ini memaksa kelompok yang paling rentan, yakni perempuan, untuk keluar dari dapur dan berdiri di barisan depan barikade. Mereka menyadari bahwa jika panas bumi merusak akuifer air bawah tanah, merekalah yang pertama akan kehilangan kedaulatan atas domestik mereka.

Kini, memasuki 2026, perjuangan telah berevolusi dari sekadar blokade fisik menjadi perlawanan intelektual. Warga kini bertransformasi menjadi "arsitek ruang hidup." Mereka memproduksi data tandingan, melakukan valuasi ekonomi mandiri atas pertanian hortikultura dan wisata air panas, untuk menunjukkan bahwa harga tanah ulayat jauh

melampaui angka-angka yang ditawarkan PT Hitay.

“Negara mungkin memberi izin di atas kertas, tapi rakyatlah yang memegang izin di atas tanah. Di Gunung Talang, tembok sosial ini sudah terlalu tinggi untuk dipanjat oleh korporasi manapun.”

Perlawanan di kaki Gunung Talang adalah cermin bagi kita semua tentang betapa mahalannya harga sebuah pembangunan jika ia merobek tenun sosial sebuah komunitas. Saran strategis ke depan bukan lagi soal teknis pengeboran, melainkan pemulihan martabat. Tanpa adanya pengakuan atas hak ulayat dan penghentian kriminalisasi, Gunung Talang akan tetap menjadi palagan sunyi di mana tetangga saling memungguni, dan investasi hanya akan berdiri di atas tanah yang tak pernah merestuinnya.



Di Kaki Gunung Talang, Jeruji Bukan Akhir Segalanya

Oleh: Jenny Noviantri

Batu Bajanjang pagi itu tidak sedang baik-baik saja. Di balik kabut tebal yang menyelimuti kaki Gunung Talang, ada aroma bawang merah yang tajam menusuk hidung—hasil keringat ribuan petani yang kini dihantui kecemasan. Suara parang yang menebas semak dan cangkul yang beradu dengan tanah vulkanik hitam yang subur biasanya menjadi simfoni kesejahteraan. Namun, sejak deru mesin PT HITAY membelah nagari pada 2018, bunyi itu perlahan berganti menjadi bisik-bisik perlawanan yang menjalar di tiap lapau dan pematang sawah. Dinginnya udara pegunungan tak lagi sanggup memadamkan hawa panas yang muncul dari konflik yang dipicu oleh ambisi energi korporasi.

Bagi warga, kedaulatan bukanlah istilah hukum yang mentereng di atas kertas. Kedaulatan adalah hal-hal sederhana namun prinsipil: mata air panas yang tetap mengalir gratis ke bak mandi mereka, serta hamparan kentang dan cabai yang

sanggup menyekolahkan anak-anak mereka hingga sarjana tanpa perlu bantuan menara-menara besi korporasi. Namun, kedaulatan agraria yang telah berurat akar selama lintas generasi ini kini sedang dipaksa tunduk pada dikte hegemoni energi yang datang dengan wajah investasi.

Di tengah perjuangan yang menguras nafas ini, rakyat Batu Bajaran dipaksa menyaksikan bagaimana hukum bisa menjadi begitu dingin dan tidak memihak. Luka itu bernama kriminalisasi. Sosok Ayu Dasril menjadi martir bagi ketidakadilan yang dirasakan seluruh nagari. Sebagai seorang paralegal dari LBH Padang yang tumbuh dan belajar hukum langsung dari derita warga, Ayu ditarik paksa dari barisan perjuangan dan dijebloskan ke penjara selama dua tahun.

Tuduhan pembakaran mobil perusahaan dan penghasutan yang dialamatkan padanya dirasakan warga sebagai serangan terhadap harga diri nagari secara kolektif. Di ruang persidangan yang mencekam, rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana narasi disusun dan saksi-saksi dihadirkan seolah hanya untuk satu tujuan: mengunci pintu sel secepat mungkin. Penggunaan saksi-saksi yang keterangannya diragukan kebenarannya oleh warga di lapangan menjadi bukti betapa rentannya pejuang lingkungan di hadapan hukum yang telah terkooptasi. Taktik shock therapy ini jelas sasarannya; memenggal nyali warga agar proyek geothermal bisa melenggang tanpa hambatan.

Namun, korporasi salah membaca mentalitas rakyat kaki gunung. Pemencaraan salah satu rekan seperjuangan mereka justru menjadi bukti paling sahih bagi warga bahwa sistem

sedang berpihak pada modal, bukan pada manusia. Jeruji besi itu bukannya mematikan gerakan, justru memicu reaksi kimia solidaritas yang lebih kuat dari sebelumnya. Luka Ayu adalah luka kolektif, dan penjara hanyalah ruang tunggu bagi perlawanan yang lebih besar.

Satu hal yang harus ditegaskan: perlawanan di Batu Bajang tidak pernah bertumpu pada satu pundak. Ini adalah perjuangan kolektif yang tak punya wajah tunggal. Di garis paling depan, barisan perempuan seperti Ibu Sur dan puluhan ibu lainnya berdiri layaknya tembok kokoh yang tak sanggup ditembus rayuan kompensasi maupun gertakan aparat. Tangan-tangan mereka, yang sehari-hari memilah hasil panen dengan telaten, kini terkepal setiap kali sosialisasi sepihak mencoba menyusup ke rumah-rumah warga.

Perempuan-perempuan inilah yang paling peka. Mereka tahu, jika mata air rusak dan tanah ulayat diprivatisasi, maka dapur dan masa depan anak cucu mereka adalah taruhan pertamanya. Perlawanan ini milik semua; dari pemuda yang setia berjaga di pintu masuk nagari saat malam buta, hingga petani tua yang tetap mencangkul meski sering mendapat intimidasi halus. Kriminalisasi terhadap salah satu bagian dari mereka hanyalah satu percikan dari api besar perlawanan rakyat. Rasa sakit satu warga adalah rasa sakit seluruh nagari, dan mereka telah membuktikan bahwa memenjarakan raga tidak akan pernah bisa memenjarakan keyakinan kolektif sebuah komunitas adat.

Puncak dari ketangguhan kolektif ini muncul saat hukum negara dianggap sudah mati suri bagi keadilan rakyat. Ketika

sebagian elit adat atau Ninik Mamak mulai tergiur janji manis korporasi dan meninggalkan anak kemenakannya berjuang sendiri di garis depan, masyarakat akar rumput mengambil langkah mendasar melalui sanksi sosial.

“Pengadilan Rakyat” ini bekerja dalam sunyi yang mencekam. Warga melakukan pengucilan total terhadap mereka yang dianggap mengkhianati amanah nagari demi keuntungan sepihak. Tidak ada lagi tegur sapa di jalan, hajatan adat diboikot, hingga muncul sumpah kolektif yang menggetarkan jiwa: **“Jika mereka meninggal, warga tidak akan melayat.”** Di Batu Bajanjang, kehilangan legitimasi moral di mata rakyat jauh lebih menyakitkan daripada vonis penjara mana pun. Sanksi ini menjadi bukti bahwa kedaulatan moral rakyat masih jauh melampaui supremasi hukum yang bisa dibeli. Rakyat telah mengambil kembali kendali sosial mereka untuk menghukum siapa pun yang berani menggadaikan masa depan ulayat demi kepentingan pribadi.

Melalui kacamata Bantuan Hukum Struktural (BHS), konflik di Batu Bajanjang adalah benturan eksistensial yang nyata. Di satu sisi ada hegemoni energi yang lapar akan lahan, di sisi lain ada kedaulatan warga yang ingin mempertahankan ruang hidup. Pola-pola kriminalisasi melalui rekayasa hukum yang kita saksikan adalah bukti bahwa hukum sering kali menjadi “palu” bagi masyarakat yang berani bersuara kritis. Ketimpangan ini bukan soal pasal semata, tapi soal struktur kekuasaan yang mencoba meminggirkan warga dari tanah ulayatnya sendiri.

Hingga November 2025, meski perusahaan terus mencoba bersolek melalui berbagai sosialisasi “pemanis”, rakyat tetap berdiri tegak. Kabut di Batu Bajanjang mungkin menutup pandangan mata, tetapi ia tidak bisa menutup kebenaran sejarah bahwa tanah ini tidak untuk dijual. Perjuangan kolektif rakyat Batu Bajanjang adalah sebuah manifesto: bahwa ruang hidup adalah harga mati. Mereka tidak akan berhenti sampai setiap jengkal ulayat mereka benar-benar merdeka dari ancaman eksploitasi, karena bagi mereka, menyerahkan tanah berarti menyerahkan masa depan.

Nagari ini masih menanti keadilan substantif. Namun, selama api solidaritas masih menyala di tungku-tungku rumah warga, selama suara penolakan masih bergema di Pasar Jumat, maka kedaulatan Batu Bajanjang tidak akan pernah bisa dibeli oleh segenggam rupiah investasi. Mereka adalah saksi hidup bahwa jeruji besi bisa mengurung tubuh, tapi tidak akan pernah bisa menghentikan langkah sebuah nagari yang ingin merdeka di tanahnya sendiri.





Ruang Hidup dalam Bayang-bayang Geothermal

Oleh:
Mhd. Qori Al-Karim
Bonar

Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dikelilingi lahan pertanian dan perkebunan, masyarakat hidup dalam ritme yang selama bertahun-tahun berjalan selaras dengan alam dan adat. Tanah bukan hanya hamparan yang ditanami atau diwariskan, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas kaum dalam sistem adat masyarakat Bonjol. Tanah Bonjol menjadi ruang untuk generasinya tumbuh, musyawarah berlangsung, dan solidaritas dibangun melalui gotong royong. Dalam ruang Bonjol, niniak mamak menjadi penjaga nilai, sementara pemerintahan nagari menjalankan fungsi administratif. Tatanan itu membentuk kehidupan sosial yang relatif stabil sebelum datangnya Proyek PLTP Geothermal.

Masuknya proyek geothermal membawa harapan sekaligus kegelisahan bagi masyarakat Bonjol. Pada awalnya, masyarakat Bonjol menerima kabar bahwa wilayah mereka

memiliki potensi panas bumi yang akan dikembangkan untuk kepentingan energi. Informasi yang beredar menyebutkan adanya ganti rugi tanah dengan nilai yang dianggap cukup layak. Namun, seiring waktu, kabar tersebut berubah menjadi kebingungan. Nilai ganti rugi yang disampaikan tidak lagi sama dengan realisasi di lapangan. Perbedaan angka yang signifikan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah.

Konflik mulai terasa ketika proses pengadaan tanah berjalan tanpa keterlibatan penuh masyarakat dalam musyawarah yang setara. Sebagian warga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai tujuan proyek, tahapan pelaksanaan, maupun dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul. Informasi lebih banyak hadir dalam bentuk pemberitahuan, bukan dialog. Dalam situasi ini, masyarakat Bonjol sebagai pemilik ruang hidup dalam pembangunan justru berada di posisi yang lemah, mereka terdampak langsung, tetapi tidak sepenuhnya dilibatkan. Ketegangan semakin meningkat ketika perbedaan sikap muncul di antara warga sendiri.

Ada yang memilih menerima penjualan tanah dengan pertimbangan pragmatis, sementara yang lain menolak karena merasa harga tidak adil dan prosesnya tidak transparan. Dalam dinamika tersebut, relasi antara masyarakat dengan niniak mamak mengalami pergeseran. Sebagian warga merasakan adanya tekanan sosial untuk mengikuti keputusan penjualan tanah. Ancaman pengucilan,

kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial, bahkan ketakutan akan dampak administratif terhadap anggota keluarga yang bekerja di pemerintahan nagari, menjadi bayang-bayang yang mempengaruhi pilihan mereka. Konflik yang awalnya bersifat administratif berubah menjadi konflik sosial yang menyentuh relasi kekerabatan.

Latar sosial Bonjol yang sebelumnya ditopang musyawarah dan kepercayaan perlahan mengalami keretakan. Modal sosial seperti gotong royong dan solidaritas kaum tidak lagi sekuat sebelumnya. Pemerintahan nagari, yang diharapkan menjadi jembatan informasi dan pelindung kepentingan warga, dinilai oleh sebagian masyarakat lebih berperan dalam memfasilitasi proses pengadaan tanah. Sementara itu, perusahaan sebagai pelaksana proyek menjadi aktor dengan kekuatan ekonomi dan struktural yang jauh lebih besar. Ketimpangan relasi kuasa inilah yang memperdalam rasa tidak berdaya di kalangan masyarakat.

Dalam perkembangan alurnya, masyarakat Bonjol tidak serta-merta melakukan perlawanan terbuka. Respons yang muncul justru cenderung pasif dan terpaksa. Banyak warga akhirnya menjual tanah bukan karena sepenuhnya setuju, tetapi karena merasa tidak memiliki cukup informasi, tidak memahami hak-haknya secara utuh, dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Penerimaan tersebut lebih mencerminkan keterdesakan daripada persetujuan sadar. Di sinilah konflik mencapai titik yang paling subtil, bukan ledakan protes besar, melainkan pelan-pelan melemahnya keberanian kolektif untuk bersuara.

Di tengah kondisi tersebut, kegiatan lapangan yang dilakukan untuk memahami situasi masyarakat menemukan bahwa persoalan utama bukan hanya pada nilai ganti rugi, melainkan pada minimnya partisipasi bermakna. Minimnya sosialisasi, terbatasnya ruang dialog, serta tekanan sosial yang dirasakan warga menunjukkan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi. Tantangan teknis seperti akses jalan yang rusak akibat banjir memang menjadi hambatan fisik, tetapi hambatan sosial berupa ketidakpercayaan dan fragmentasi komunitas jauh lebih kompleks. Cerita masyarakat Bonjol dalam konteks proyek geothermal ini menggambarkan bagaimana pembangunan berskala besar dapat mengubah lanskap sosial sebuah nagari.

Konflik pengadaan tanah tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga menggoyahkan struktur adat dan hubungan kekerabatan. Tanah ulayat yang seharusnya menjadi simbol keberlanjutan kaum berubah menjadi sumber perdebatan dan perpecahan. Pada akhirnya, narasi ini belum benar-benar selesai. Masyarakat Bonjol masih berada dalam proses mencari kembali ruang partisipasi dan solidaritas yang sempat melemah. Pemberdayaan komunitas menjadi kunci agar mereka tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pembangunan, tetapi kembali menjadi subjek yang memiliki suara dan daya tawar. Sebab pembangunan yang ideal bukan hanya tentang menghasilkan energi listrik dari panas bumi, melainkan juga tentang menjaga energi sosial, kepercayaan, musyawarah, dan martabat masyarakat agar tetap menyala di tengah perubahan.

Hegemoni Keindahan di Bawah Kaki Gunung

Oleh: Anisa Maharani

Gunung Tandikek-Singgalang tidak hanya sekedar lanskap alam semata, melainkan ruang bermakna yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Keindahan yang terpancar pada kaki gunung dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keindahannya terpancar dari lereng-lereng hijau dan kabut tipis yang turun perlahan di pagi hari, menghadirkan suasana yang hening sekaligus sakral. Kondisi tersebut tidak hanya indah untuk dipandang, akan tetapi melalui kondisi ekologis yang ada turut memberikan nilai ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal.

Nagari Pandai Sikek yang secara administratif terletak di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang berada tepat di bawah kaki gunung Tandikek dan Singgalang. Aktivitas masyarakat setempat tumbuh dengan suasana yang tenang.

Kabut tipis turun yang berasal dari lereng Gunung Tandikek-Singgalang, menyelimuti sawah, ladang, dan rumah-rumah warga yang berdiri akrab dengan alam. Tanah yang subur, air yang mengalir dari mata air pegunungan, dan kehidupan berjalan dalam ritme yang telah dihidupkan dari generasi ke generasi. Kondisi ekologis tersebut tidak hanya dapat dimaknai sebagai keindahan alam semata, akan tetapi telah menjadi bagian dari keluarga yang dirawat, dijaga, dan diwariskan.

Keindahan Pandai Sikek tidak lahir begitu saja. Ia adalah gambaran dari hasil hubungan panjang antara manusia, adat, dan tanah ulayat. Sawah yang terbentang tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, akan tetapi juga sebagai penopang ekonomi dan identitas. Bertani, mengelola tanah ulayat, menjaga mata air, dan merawat ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menjadikan Pandai Sikek bukan hanya sekadar lanskap alam, melainkan manifestasi dari kedekatan yang tumbuh di kehidupan masyarakat, adat, dan lingkungan yang dijaga melalui nilai musyawarah dan kearifan nagari.

Namun, dibalik keheningan Gunung Tandikek-Singgalang tersebut, tersirat ancaman yang perlahan menyusup. Pemerintah, atas nama pembangunan nasional dan transisi energi terbarukan, menetapkan Kawasan Tandikek-Singgalang sebagai wilayah potensial pengembangan panas bumi. Keindahan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat setempat justru dipandang sebagai cadangan energi yang siap untuk dieksplorasi. Proyek *geothermal*

hadir dengan narasi energi bersih, tetapi bagi masyarakat Pandai Sikek, ia datang sebagai bayang-bayang perampasan ruang hidup. Pengeboran, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas eksplorasi yang berisiko merusak struktur tanah, mengganggu sumber air, serta mengancam lahan pertanian masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan pondasi utama ekonomi dan mampu merusak identitas sosial masyarakat.

Upaya perampasan ini tidak berlangsung secara terang-terangan. Ia hadir melalui kebijakan, peta wilayah kerja, dan surat keputusan yang lahir jauh dari ruang partisipatif musyawarah dengan masyarakat nagari. Janji atas kestabilan ekonomi masyarakat dengan menghadirkan bayang-bayang semu lapangan pekerjaan, sementara suara masyarakat kian terpinggirkan. Tatkala masyarakat mulai menyadari dampak nyata dari proyek serupa pada daerah lain (seperti ; PLTP Sorik Marapi, Mandailing Natal), tanah yang tidak lagi menjadi subur, uap panas yang muncul di luar titik pengeboran, serta rusaknya keseimbangan ekologis.

Menyikapi dampak yang telah terjadi di beberapa daerah yang telah dilakukan proyek energi panas bumi tersebut, kesadaran kolektif pun tumbuh di tengah masyarakat Nagari Pandai Sikek. Mereka hadir melalui diskusi kecil dengan ciri khas pembicaraan di warung kopi, yang berlanjut hingga musyawarah adat, masyarakat perlahan membangun penolakan atas proyek strategis tersebut sebagai bagian dari bentuk upaya dalam mempertahankan ruang hidup.

Penolakan masyarakat di Pandai Sikek bukanlah reaksi spontan yang terjadi dalam waktu satu malam, melainkan hasil dari proses panjang dalam membaca situasi, memahami ancaman, dan menyadari ketimpangan relasi kuasa antara penguasa, korporasi, dan masyarakat nagari. Baliho penolakan yang muncul ke permukaan pada beberapa titik di Nagari Pandai Sikek bukan hanya semata sebagai simbol resistensi, akan tetapi hal tersebut merupakan alarm penanda, bahwa seharusnya proyek Pembangunan strategis nasional energi terbarukan tidak dibayarkan dengan kerusakan lingkungan.

Menyikapi ancaman proyek strategis energi terbarukan panas bumi (energi geothermal) tersebut, hadirnya kesadaran kolektif dan adanya dorongan dari masyarakat setempat dalam upaya mengubah keputusan politik tersebut, berbagai upaya pun turut dilakukan dalam rangka mempertahankan ruang hidup masyarakat setempat. Advokasi yang dilakukan secara berlapis pada tingkatan pemerintahan daerah, dengan harapan suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan. Surat demi surat dilayangkan, aspirasi demi aspirasi disampaikan. Namun yang berulang kali mereka dapati adalah ruang hampa, kesunyian birokrasi dan sikap abai negara yang seakan tak beranjak dari posisinya.

Dalam konteks ini, keindahan Pandai Sikek menjadi paradoks: ia dipuja sebagai potensi energi, tetapi diabaikan sebagai ruang hidup. Negara berupaya merampasnya melalui kebijakan yang tidak berpihak, sementara masyarakat berjuang mempertahankannya melalui pengorganisiran, solidaritas, dan bantuan hukum struktural. Pandai Sikek

bukan sekadar wilayah konflik, melainkan cermin bagaimana pembangunan yang abai pada keadilan ekologis dapat berubah menjadi bentuk kekerasan struktural. Di kaki Gunung Tandikek-Singalang, keindahan alam kini bukan hanya untuk dirawat, tetapi juga untuk diperjuangkan.





BAB III

TANAH YANG DIRAMPAS/ BANGKAI BERBALUT MADU



Bangkai Berbalut Madu di Batas Tiga Negeri

Oleh:

Dita Indriani Siregar

Nurul Qariati Fadila

Zahra Nurul Aulia

Terletak di antara dua raksasa alam Kerinci dan Bengkulu, punggung bukit barisan Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjulang di timur, dan dataran rendah pesisir barat yang landai, aliran sungai jernih mengalir membelah negeri membawa kehidupan akan kesejahteraan, membasahi tanah yang sejak lama menjadi sumber kehidupan, meliuk dan memanjang di ujung selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat: Tapan. Negeri yang menyimpan sejuta kekayaan alam dengan ritme adat yang masih terjaga

Masyarakat masih terikat simpul adat yang kuat di payungi empat suku besar, Melayu Gadang, Melayu Kecil, Chaniago dan Sikumbang yang turun temurun menjaga tanah ulayat sebagai harta pusaka dan ruang kehidupan. Keseharian masyarakat di penuh dengan harmoni gotong royong dan menghormati adat istiadat yang masih melekat erat, menciptakan wajah sebuah negeri yang tampak begitu stabil, dan “baik baik saja”. Namun jangan terkecoh oleh

lanskap memukau dan kekayaan bumi yang tersimpan didalamnya.

Terucap kata oleh Amir Syam, seorang paralegal yang sudah 15 tahun sudah kenyang akan asam dan garam setiap melakukan perlawanan, memperjuangkan, dan menyuarakan ketidakadilan yang terjadi oleh keserakahan yang merugikan banyak orang. Ia menilai kondisi Tapan hanya baik di luarnya saja, "Selama ini Tapan yang terlihat hanya kulit luarnya saja" ujarinya memulai perbincangan mendalam tentang hal yang tersembunyi lainnya di wilayah Tapan ini. Kedamaian di Tapan hari ini hanyalah ilusi, dibalik menghamparkan sawah, berlimpahnya panen perkebunan, tersimpan konflik agraria dan kerusakan alam yang beliau gambarkan dengan metafora tajam: seperti "Bangkai yang berbalut madu dan diolesi minyak kasturi".

Baunya busuk di dalam, menggerogoti keadilan yang seharusnya menjadi hak masyarakat, namun dipoles seindah mungkin agar kehidupan damai dan perwajahan masyarakat kesejahteraan tidak tercium oleh orang luar. Sangat ironi, karena kekayaannya menyimpan banyak luka yang akhirnya membusuk dan berubah menjadi bangkai berserakan, menjadi medan ketamakan, memecah persaudaraan, dan menumbuhkan ketakutan. Tanah yang penuh sumber penghidupan ini menjadi candu bagi ulat-ulat pemakan bangkai alam keserakahan penyebab kerusakan yang memecah kesejahteraan masyarakat.

Luka berkepanjangan yang sampai sekarang tidak menemukan titik akhir di tanah Tapan ini bermula dari sebuah

tanda tangan kesepakatan 29 tahun yang lalu tepatnya tahun 1997. Kala itu, PT. Citalaras Cipta Indonesia (CCI) datang bukan sebagai penjajah, melainkan membawa "madu" berupa janji kesejahteraan bagi masyarakat agraris di ujung selatan Sumbar ini. Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tapan, sebuah ikatan janji yang kala itu disebut kemitraan disepakati dengan skemanya terdengar fair dan menjanjikan. Perusahaan akan membangun kebun plasma seluas kurang lebih 1.280 hektar akan diperuntukan untuk membangun kehidupan yang sejahtera dengan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat, sebagai bentuk kompensasi dan tanggung jawab sosial atas tanah ulayat yang diserahkan menjadi kebun inti yang berujung ingkar.

Di atas kertas, penghitungan bagi hasil empat puluh persen untuk perusahaan dan enam puluh persen untuk masyarakat adalah sebuah gambaran masa depan yang cerah untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Warga membayangkan masa depan dimana tanah leluhur mereka tidak hanya menghidupi, tetapi juga mensejahterakan anak cucu melalui buah sawit menjadi jalan keluar dari kemiskinan struktural yang telah lama membelit nagari.

Namun, bayangan tersebut berubah ke arah yang salah, dan menjadi janji yang tak kunjung dipenuhi. Dua puluh sembilan tahun sudah sejak perjanjian dituliskan, namun janji tersebut berbalik tiga ratus enam puluh derajat menjadi debu yang diterbangkan angin, diperpanjang dengan datangnya pihak lain sebagai penanam modal tanpa pemberitahuan dan musyawarah dengan masyarakat yang tergabung ke

dalam KUD Tapan, pemandangan yang indah, tanah ulayat dikuasai sepihak, sementara masyarakat mewarisi konflik yang berlarut-larut dalam proses hukum menagih janji manis yang tak kunjung dipenuhi. Upaya diskusi bersama kedua belah pihak tak pernah terwujud, diingkari dan pengelakan setiap ajakan musyawarah mencari penyelesaian. Namun, lahan inti perusahaan tetap mengepul mengeluarkan asapnya melalui cerobong bangunan pabrik dan debu lalu lalang mobil besar pengangkut hasil kebun sawit menambah warna pada langit biru Tapan.

Di panggung yang sama, pembukaan lahan tambang emas secara diam-diam oleh beberapa masyarakat di pedalaman hutan dilakukan untuk penyambung ekonomi kehidupannya. Keuntungan aktivitas pendulangan yang masih menggunakan alat seadanya dengan hasil menggiurkan dari informasi mulut ke mulut orang yang mengetahuinya menjadi pemikat masyarakat lainnya untuk ikut serta mencoba peruntungan di pedalaman bukit barisan. Awal mulai adanya isu-isu keuntungan pendulangan emas menghasilkan 100 Juta menarik minat masyarakat ikut menjajalnya dengan harapan yang sama, lokasi yang berjarak 10 kilometer dengan waktu tempuh diperkirakan dua jam berjalan kaki dengan akses jalan setapak seadanya memasuki kawasan hutan tidak menjadi hal yang melunturkan niat bagi pencari sumber penghasilan yang menggiurkan. Dari yang awalnya satu kelompok kecil berkembang menjadi beberapa kelompok dengan niat yang sama memasuki pedalaman hutan dengan peralatan seadanya. Salah seorang masyarakat yang kami temui menyampaikan bahwa, informasi mengenai

aktivitas tambang emas berawal dari mulut ke mulut, dan dengan hasil yang didapat itu sangat menggiurkan untuk menambah penghasilan keluarga “kalau saya tidak terbatas akses menuju lokasi saya juga akan ikut masuk ke hutan membantu ekonomi keluarga”

Aktivitas tambang yang dilakukan secara ilegal dan tidak terstruktur nantinya akan menimbulkan dampak jangka panjang pada ekosistem kawasan hutan seperti tanah longsor, tercemarnya kualitas air pegunungan dan ketakutan akan dampak mendatang dari kawasan bekas penambangan apabila tidak dikelola dengan baik nantinya.

Pada awal Januari 2026, polisi telah melakukan patroli dan penyitaan terhadap alat-alat penambangan emas yang ditemukan pada kawasan aktivitas penambangan namun tidak ditemui pelaku penambangan ilegal tersebut, kemudian polisi sudah memasang garis polisi untuk pengamanan lokasi dan melakukan patroli secara berkala. Karena sudah tercium oleh aparat dan adanya patroli ke kawasan tersebut tidak mengurungkan niat beberapa kalangan untuk tetap melakukan aktivitas penambangan namun dilakukan secara diam-diam pada malam hari untuk mengelabui aparat kepolisian.

Luka lain ikut bersemi dan terpampang bukti nyata di tanah Tapan, penebangan hutan di hulu sungai menjadi awal dari rangkaian bencana yang perlahan menggerus kehidupan warga. Punggung bukit yang hijau kini telanjang dan rentan, menyisakan tanah kering gersang yang akan siap terkikis setiap musim hujan datang melanda. Ketika hujan enggan

memberi jeda bagi tanah untuk bernapas, tak ada lagi yang akan meresap air hujan di dalam tanah, air bah datang tiba-tiba mengalir membawa batang pohon hasil pembabatan dan lumpur merendam pemukiman dan lahan pertanian mengingatkan pada luka lama yang masih menganga pada tahun tahun sebelumnya. "Air bah datang menggenangi rumah masyarakat tanpa aba-aba, tanpa persiapan" ujar Amirsyam menceritakan kondisi rumahnya saat kejadian banjir beberapa tahun lalu.

Kejernihan sungai perlahan tenggelam di bawah lumpur, air meluap siap untuk merendam sawah-sawah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Hamparan padi terbentang subur yang hampir menjadi kuning keemasan berubah diselimuti lumpur, berujung gagal panen sebelum sempat menikmati hasil jerih payah merawatnya. Bagi petani Tapan, banjir lumpur bukan hanya bencana alam, tetapi luka kehidupan yang terus berulang.

Kerusakan ini tidak berdiri sendiri. Di balik gergaji di hulu berdiri kepentingan ekonomi skala besar, yang memandang hutan hanya sebagai angka dan laba, bukan sebagai penyangga kehidupan. Sungai yang bagi warga adalah sumber air, irigasi, dan penopang sawah dipaksa menanggung beban dari kerakusan di atasnya.

Warga menyadari perubahan itu bukan dari cerita, melainkan dari nadi air yang kian rapuh di depan mata. Air seolah enggan kembali bening, arus semakin liar, dan banjir tak lagi mengetuk, ia datang berulang. Sawah yang dahulu cukup dipupuk dan diairi, kini harus dibersihkan dari lumpur

berlapis-lapis, dengan hasil yang tak lagi sebanding dengan tenaga.

Bagi masyarakat Tapan, hutan di hulu bukan hanya kehilangan batang-batang kayu, melainkan tentang retaknya ikatan lama antara manusia dan alam. ketika hutan tak lagi menjadi tameng bagi kehidupan, warga di hilir menjadi pihak pertama yang membayar harga kerusakan tanpa pernah diajak bicara, apalagi dimintai persetujuan.





Di Balik Jeruji Tanah Sendiri, Ironi Petani Kapa yang Menanti Keadilan

Oleh:

Fadhilatul Husni

Lidya Dwi Utami

Pagi itu, bukan kicauan burung yang menyapa, bukan pula desis angin yang meniup pelepah sawit. Melainkan raung panjang sirene yang membelah keheningan ladang petani Kapa. **“Jam 10 pagi kami ditangkap, diangkat paksa. Saya melawan, tapi mereka tetap menyeret saya. Bahkan, saya sempat ditampar. Mau buang air kecil di jalan saja tidak diperbolehkan. Sirene terus dibunyikan, seolah-olah kami ini teroris,”** ujar Ibu Ica dengan mata berkaca-kaca saat kami temui Kamis (15/1/2025).

Ibu Ica, seorang wanita paruh baya yang kami temui saat tiba di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, mulai menumpahkan kesedihannya. Ia adalah satu dari sekian banyak warga yang menjadi korban kriminalisasi saat konflik memuncak. Kala itu, media nasional ramai memberitakan tindakan represif aparat terhadap petani Kapa. Di ladang yang sama, di atas tanah

yang masih menyimpan jejak keringat mereka, warga hanya ingin bertahan hidup. Mereka menanam tanaman pangan demi sepiring nasi di atas meja. Namun, kehadiran aparat menjungkirbalikkan rasa aman mereka. Petani yang semestinya dipandang sebagai pahlawan pangan, justru diperlakukan layaknya ancaman keamanan.

“Kami ini cuma cari makan. Kami bukan penjahat,” ucap Ibu Ica. Kalimat itu bukan sekadar pembelaan, melainkan jeritan hati yang mungkin terlalu sederhana untuk dipahami oleh institusi besar di atas sana. Akar sengketa ini bermula pada tahun 1997. Tanah ulayat Nagari Kapa yang diserahkan kepada negara berubah status menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Lahan tersebut diberikan kepada PT Permata Hijau Pasaman I (PT PHP I), bagian dari Wilmar Group. Perubahan status tanah ulayat menjadi HGU tersebut disinyalir tidak disosialisasikan secara transparan kepada seluruh anak kemenakan. Masyarakat merasa proses tersebut dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah yang melibatkan seluruh elemen nagari. Tiba-tiba saja, tanah leluhur beralih kendali ke tangan korporasi.

Masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada tanaman jagung dan pisang tersentak. Mereka kehilangan akses terhadap ruang hidupnya. Janji manis berupa kebun plasma dengan skema bagi hasil yang adil tak kunjung terealisasi. Ketimpangan ini melahirkan ketidakadilan struktural, perusahaan semakin digdaya dengan ribuan hektar lahan, sementara masyarakat pemilik ulayat asli terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri. Perjuangan ini sebenarnya pernah

berbuah manis di kancah internasional. Pada Mei 2017, Panel Keluhan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) mengeluarkan putusan yang memihak masyarakat Kapa. Saat itu, RSPO mengakui adanya pelanggaran hak atas tanah ulayat dan memerintahkan Wilmar Group untuk menghentikan aktivitas di lahan sengketa hingga ada kesepakatan yang adil.

Bagi warga, putusan beberapa tahun silam itu adalah pengakuan dunia atas hak mereka. Namun, kemenangan di atas kertas itu seolah menguap begitu saja. Bukannya dialog yang berlanjut sesuai mandat internasional, warga justru kembali harus berhadapan dengan pendekatan keamanan di lapangan. Harapan sempat kembali merekah pada tahun 2019. Pucuk Adat dalam sebuah forum terbuka menyatakan bahwa HGU perusahaan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Bagi masyarakat Kapa, pernyataan ini adalah legitimasi moral untuk kembali mengelola tanah ulayat mereka. Sejak 2020, cangkul-cangkul petani kembali berayun, mencoba merajut asa di lahan seluas 483 hingga 600 hektar tersebut. Namun, negara merespons upaya “pulang ke tanah asal” ini bukan dengan dialog, melainkan dengan pendekatan keamanan.

Konflik mencapai titik didih pada tahun 2024. Wajah Nagari Kapa berubah tegang. Aparat kepolisian hadir secara intensif, menciptakan atmosfer intimidasi di tengah ladang. Puncaknya terjadi pada 4 Oktober 2024, saat penggusuran paksa dilakukan. Tanaman warga diratakan, pondok-pondok kerja dihancurkan, dan jeritan kaum ibu petani tenggelam oleh deru mesin alat berat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat bergerak cepat mengamankan sekitar 11 warga yang

dituding sebagai “provokator”.

Kini, pemandangan di Nagari Kapa telah berubah sepenuhnya. Akses menuju lahan yang disengketakan itu seolah tertutup rapat, dipagari oleh pengawasan ketat yang membuat siapa pun kesulitan untuk melihat kebenaran dari dekat. Saat kami mencoba menjangkau lokasi, tembok pembatas tak kasat mata seolah berdiri tegak, menegaskan bahwa tanah itu kini menjadi wilayah terlarang bagi pemilik aslinya. Para petani yang dulunya bebas mencangkul dan menyemai harapan, kini hanya bisa memandang dari kejauhan. Menatap ladang itu kini tak ubahnya menatap benteng yang asing, sebuah ruang hidup yang dijaga ketat, seolah-olah di dalamnya tersimpan rahasia yang tidak boleh terjamah oleh mata publik. Larangan akses ini menjadi simbol paling nyata dari hilangnya kedaulatan warga, mereka kini layaknya tamu yang diusir dari rumah sendiri.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang mendampingi masyarakat sejak rencana penanaman kembali oleh perusahaan mencuat, menegaskan bahwa apa yang menimpa petani Kapa adalah bentuk nyata kriminalisasi. “LBH mulai melakukan pendampingan aktif sejak 2024, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Masyarakat hanya mencoba mempertahankan tanah ulayat mereka dari ekspansi PT PHP I,” ujar Jalal dari LBH Padang pada Jumat (13/2/2026).

Menurut Jalal, proses hukum terhadap 11 warga tersebut kini telah memasuki babak krusial di meja hijau. Setelah melewati rangkaian pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan, para petani kini tengah menanti tuntutan jaksa

yang dijadwalkan pada sidang mendatang. Setelah agenda tuntutan, para petani akan menyampaikan pembelaan (pledoi) sebelum akhirnya hakim mengetuk palu putusan. Bagi warga Kapa, putusan ini bukan sekadar soal bebas atau penjara, melainkan pengakuan negara atas hak mereka yang telah tercerabut dari akar tanah leluhur.

“Kami percaya bahwa masyarakat adat Nagari Kapa bukanlah penjahat. Mereka adalah warga yang mempertahankan ruang hidupnya. Harapan kami, pengadilan benar-benar memberikan putusan seadil-adilnya dengan melihat sebab-akibat mengapa mereka melakukan perlawanan,” tutup Jalal. Kini, di tengah sunyi yang menyelimuti ladang yang tak lagi bisa mereka injak, harapan warga Kapa hanya tersisa di ujung palu hakim. Ibu Ica dan bersama warga lainnya tidak meminta banyak mereka hanya ingin kembali mendengar kicau burung di ladang mereka sendiri, tanpa harus dibayangi ketakutan akan raung sirine yang sewaktu-waktu bisa kembali memecah pagi. Sebab bagi mereka, tanah bukan sekadar komoditas, melainkan napas yang tak seharusnya dipasung oleh jeruji.



BAB IV

LANGIT KELABU DI PESISIR



Langit Kelabu di Pesisir

Oleh: Ady Fakhru Rozi

Kota Padang adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Di balik indahnya Kota Padang terutama nya daerah pesisir pantai Kota Padang, terdapat hal-hal polemik yang menyelimuti daerah pesisir Kota Padang. Salah satu contohnya itu adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di kawasan Bungus terutama nya di kawasan Teluk Kabung Selatan, Tengah dan Utara di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan eksistensi keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih.

Eksistensi keberadaan PLTU Teluk Sirih yang mulai beroperasi sejak 2014 hingga kini menimbulkan berbagai macam tanggapan dan reaksi dari masyarakat yang berada di kawasan Bungus, ada yang bertanggapan pro dan ada juga yang bertanggapan kontra. Ada yang berpendapat bahwa dengan keberadaan PLTU akses jalan dan transportasi menuju kawasan Bungus semakin mudah dan lancar,

keberadaan PLTU juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun masyarakat yang bertanggung kontra membeberkan argumentasi bahwa keberadaan eksistensi PLTU berdampak buruk terhadap kawasan Bungus terutama daerah Teluk Sirih in-a-long-run. Keberadaan PLTU menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar PLTU. Isu yang sering diangkat antara lain pencemaran udara akibat emisi gas buang, pencemaran air laut yang berada di sekitar PLTU, kerusakan ekosistem pesisir, serta ancaman terhadap mata pencaharian nelayan.

Selain persoalan lingkungan, eksistensi keberadaan PLTU Teluk Sirih juga menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan pihak pengelola dan pemerintah seperti kurangnya transparansi dalam proses perencanaan, minimnya pelibatan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan, serta perbedaan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi faktor utama yang memperkeruh keadaan yang menghantui eksistensi keberadaan PLTU Teluk Sirih. Problematika yang berada di PLTU Teluk Sirih sudah ada bahkan sejak proses pembangunan dan pembebasan lahan untuk mendirikan PLTU Teluk Sirih, faktanya terjadinya sengketa lahan dan ganti rugi yang berlangsung sejak 2008 hingga 2014, yang mana adanya dugaan manipulasi dalam proses inventarisasi kepemilikan tanah dan penetapan kawasan hutan lindung untuk lokasi PLTU, dengan melibatkan oknum pejabat pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan bahkan Ketua KAN.

Di balik semua problematika yang menghantui PLTU Teluk Sirih, masyarakat yang berada di Bungus terkhususnya area Teluk Sirih terus dan secara konstan menyuarakan keluhan mereka mengenai eksistensi PLTU yang berada di tengah masyarakat. Masyarakat terus menjerit mengeluhkan bagaimana daerah mereka yang pada awalnya melimpah dengan ikan-ikan laut yang mana ikan-ikan tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat luas, namun dengan berdirinya PLTU ikan-ikan yang awalnya melimpah ruah di kawasan Teluk Sirih kini pada saat ini menjadi sangat sedikit bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan lautan yang sudah tercemar.

Masyarakat terus menyampaikan ketidaknyamanan mengenai transportasi angkutan PLTU yang lalu lalang di jalan sejak tahun 2021 hingga sekarang, yang awal moda transportasi pengangkutan batubara sebelum 2021 menggunakan jalur laut, namun terjadi perubahan drastis yang menjadikan pengangkutan batu bara pada tahun 2021 menggunakan jalur darat dengan menggunakan truk-truk besar yang berlalu lalang pemukiman warga di Bungus yang mana hal ini menimbulkan keresahan dan ketakutan oleh masyarakat karena adanya risiko kecelakaan dan bahaya bagi anak-anak yang bermain dan melintasi jalan-jalan tersebut.

Polemik dan insiden yang tak henti-henti mengitari PLTU Teluk Sirih. Pada 2020, terjadi kecelakaan yang melibatkan seorang nelayan yang tersedot mesin water intake yang memicu tuntutan tanggung jawab dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap PLTU. Lalu, pada 2022

terjadi kebakaran hebat yang terjadi di PLTU yang melanda belt conveyor di PLTU. Insiden ini menewaskan satu pekerja K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) karena kecelakaan saat pemadaman dengan dugaan penyebab percikan api dari material batubara.

Masyarakat Bungus, terutama Teluk Sirih menjerit kepada pejabat pihak setempat mengenai keluhan-keluhan tersebut tetapi pejabat pihak setempat berlagak seakan suara rakyat tidak ada dan berlagak bahwa semuanya baik-baik saja sedangkan masyarakat terus menderita dan terus berdampak negatif ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Bungus terutamanya masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka dengan bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Jika laut sudah tercemar dikarenakan limbah yang dikeluarkan oleh PLTU maka bagaimana cara masyarakat untuk melanjutkan kehidupan mereka jika sumber kehidupan mereka semakin rusak.

Nelayan-nelayan tradisional menceritakan bahwa pada 2016-2017 tangkapan ikan di kawasan Teluk Sirih masih melimpah ruah, bahkan nelayan tersebut pernah menangkap sekitar 500 kilogram dalam satu malam saja. Namun pendapatan nelayan saat melaut, empat tahun belakangan ini turun signifikan. Pada 2024, nelayan di Teluk Sirih tidak bisa bergantung dari hasil laut saja lagi. Bahkan, dalam satu kali melaut nelayan bisa membawa pulang ikan hanya dua kilogram saja. Nelayan Teluk Sirih mengatakan, pendapatan dari laut sekarang tidak menentu meskipun dari dulu ada musim-musim tetapi pada saat sekarang ini nelayan tidak

bisa memprediksi lagi bagaimana kondisi laut.

Di balik semangat ambisi pemerintah Kota Padang untuk terus mengembangkan dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan listrik terdapat segmen kecil masyarakat kecil yang tidak berdaya terus menderita dan terus dizalimi sedangkan kewajiban dan keharusan semua pemerintahan untuk melindungi seluruh warga nya baik, tetapi bagaimana jika pemerintah itu sendirilah pelaku aktor utama yang menindas dan memberikan penderitaan kepada rakyatnya.

BAB V

REFLEKSI

Dari perjalanan menyusuri hulu hingga hilir, dari gunung hingga pesisir, kami menyaksikan satu pola penindasan yang seragam: kemiskinan dan penderitaan warga bukanlah takdir alamiah, melainkan hasil dari desain pemiskinan struktural. Kesimpulan kian menjadi terang bahwa yang kita saksikan hari ini adalah fase baru konflik ekstraktif di Sumatera Barat. Sebuah fase ketika kekerasan tidak selalu kasat mata namun mengendap dalam relasi sosial; ketika transisi energi dan ekspansi industri berjalan jauh lebih cepat daripada pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Pengalaman *live-in* ini telah merobek kenyamanan intelektual kami, memaksa kami melihat dengan mata telanjang bahwa di balik deretan angka investasi, terdapat nyawa, sejarah, dan ruang hidup yang dikorbankan.

Pada saat yang sama, tulisan ini juga mencatat dengan bangga bahwa masyarakat tidak pernah berada dalam posisi pasif. Di tengah tekanan hegemonik, perlawanan telah

bertransformasi dari sekadar blokade fisik menjadi produksi pengetahuan tandingan dan pembacaan kritis atas narasi pembangunan. Mulai dari dokumentasi mandiri, konsolidasi komunitas, penguatan solidaritas perempuan, hingga upaya advokasi hukum. Mereka tidak hanya menjaga tanah, tetapi juga menjaga ingatan, menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan pondasi identitas, relasi kekerabatan, serta keberlanjutan generasi.

Tulisan-tulisan dalam buku ini tidak akan pernah lahir tanpa kebesaran hati warga yang bersedia membagi ruang hidupnya dengan kami. Kami menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami memberi penghormatan se hormat-hormatnya kepada Bundo Kandung, kepada para Mamak, dan kepada dunsanak yang telah meminjamkan keberanian untuk berjuang. Meski kaki gemetar, terik memanggang, hukum mengekang, dan nyawa terancam; napas tetap berjuang, dan tubuh tetap ditanam di atas tanah warisan. Terima kasih kepada masyarakat "sang arsitek sejati" yang menyalurkan keberanian agar kita bersama melawan.

Kepada mereka yang merumuskan kebijakan di balik meja-meja ber-*AC* dan gedung pemerintahan: pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar apakah pembangunan akan terus berjalan, melainkan bagaimana ia dijalankan, untuk siapa, dan dengan risiko siapa? Selama ruang hidup masih diperlakukan sebagai objek yang dapat dinegosiasikan tanpa persetujuan yang bebas dan setara, kami menyatakan: tidak ada sejengkal pun tanah tempat kami bersawah

ladang yang berhak dirampas! Kebijakan penindasan adalah pengkhianatan bagi rakyat.

Jadi, jangan berharap debu batubara yang menyesakkan itu, panasnya geothermal yang meluluhkan budaya, rakusnya sawit yang menghisap air di tanah gersang, dan bulldoser yang mengikis tanah leluhur kami bisa melenggang bebas tanpa perlawanan. Di saat keadilan tidak bisa lagi ditemukan di meja hijau pengadilan, maka kami akan bertahan pada tanah ulayat ini. Perempuan yang melawan, anak-anak yang tumbuh dari asap, pemuda yang bertahan, hingga yang tua renta, takkan pernah menyerahkan warisan ini.

Di balik ladang yang masih hijau dan laut yang masih beriak, ada masyarakat yang berjaga dalam kecemasan, namun menolak untuk menyerah. Buku ini bukanlah sebuah nisan kesedihan atas kekalahan, melainkan sebuah undangan perlawanan yang terbuka. Tulisan ini membuka ruang pembacaan ulang bahwa keadilan tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi dari sejauh mana masyarakat dihormati dan dilindungi. Terakhir, mari kita meyakini dalam hati: iman adalah menjaga, berucap adalah menentang, dan berjalan adalah melawan.

Seperti lantunan lagu Hindia, "Bayangkan jika kita tidak menyerah". Itulah kita. Menjelma orang-orang yang menolak menyerah di bawah kepal tangan besi dan janji manis kesejahteraan yang terbalut bangkai ekstraktivisme. Pemerintah harus membaca ulang sungguh-sungguh bahwa hakikat pembangunan adalah masyarakat yang berdaya. Selama ruang hidup masih diperlakukan sebagai objek yang

dirampas, konflik akan terus menemukan bentuknya. Namun, kita akan terus merapatkan barisan, mengikat solidaritas, dan menjadikan perlawanan sebagai budaya. Baik dalam sunyi maupun dalam suara lantang yang tak tertahankan, muara kita hanya pada satu kata: **LAWAN!!!**

ENGLISH VERSION

OUTCLASS KALABAHU 2025 REPORT

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I

CHAPTER II

THE EERIE SILENCE69

THE SILENT BATTLEFIELD AT BATU BAJANJANG:
WHEN INVESTMENT SEVERED BLOOD TIES.....75

AT THE FOOT OF MOUNT TALANG,
BARS ARE NOT THE END OF EVERYTHING79

LIVING SPACE IN THE
SHADOW OF GEOTHERMAL ENERGY85

THE HEGEMONT OF BEAUTY THE FOOT
OF THE MOUNTAIN89

CHAPTER III

HONEY-COATED CARCASSES
AT THE BORDER OF THREE COUNTRIES97

BEHIND BARS ON THEIR OWN LAND, THE IRONY OF
KAPA FARMERS AWAITING JUSTICE103

CHAPTER IV

GRAY SKIES ON THE COAST111

CHAPTER V

CHAPTER I

RED THREAD

West Sumatra is like a traditional Minangkabau house under siege by a storm of extractivism. From the slopes of Mount Talang to the foothills of Tandikek-Singgalang, from the vast forests to the coastline of Padang City, the living space of the community is being slowly carved away. We are witnessing a pattern that is too consistent to be called a coincidence: projects come with a legal face and the language of progress, but leave behind social, ecological, and psychological residues that are never truly counted as the costs of development.

Faced with the massive destructive power of extractivism, LBH Padang refuses to be mere spectators. Upholding its commitment to defending human rights, this institution has chosen to be present and stand tall alongside the community. We in Padang believe that the spirit of struggle must not be broken; it must be continuously regenerated and passed on. Therefore, every individual who steps through the door of LBH Padang must undergo a trial by fire called Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). As the first step in the regeneration of human rights activists, they do not merely study legal texts, but directly enter the arena, blend in, and

live alongside communities that are being battered by the storm of crisis.

From the process of living and learning together with the people, this book was born. This book does not merely summarize the experiences of the KALABAHU 2025 participants. More than that, this book reads patterns of injustice. These patterns show how development is always presented as an “inevitability,” while the people’s resistance is unilaterally positioned as a “deviation.”

Look at how this project works on the ground. In Batu Bajanjang, the designation of a geothermal working area shifted the meaning of the mountain from “Pasak Bumi” (Earth’s Anchor) to merely an energy reserve. In Pandai Sikek, the beauty of the mountain foothills is seen purely as a potential for exploitation. In Tapan and Kapa, customary land that has been passed down from generation to generation has been transformed into land use rights (HGU) that the original owners are forbidden to touch. Meanwhile, in Bungus, the city’s bright lights come at the cost of coal dust that residents breathe in every day. The cases may differ in location, commodity, and technical actors. However, the structure of the relationship is similar: top-down decisions, minimal participation, power imbalances, and the response of security forces when conflicts escalate.

What must be critically emphasized is that these conflicts are not merely the result of a “lack of socialization.” They are the product of a development model that inherently treats living spaces as objects that can be negotiated without

the free and equal consent of the community. Traditional deliberations are reduced to administrative formalities, and community consent is narrowed down to the signatures of a handful of elites. When resistance arises, it is framed as an obstacle to investment, rather than being heard as an alarm for democracy.

Furthermore, this storm of space grabbing does not always erupt violently in the streets, but manifests itself in latent social wounds. *Lapau-lapau*, which used to be warm gathering places, are now silent. Mosques have become spaces of mutual suspicion and consolidation. Niniak Mamak, a place of refuge, has lost its spirit amid the pressure of corporate politics and economics. The apparent calm on the surface actually hides social fragmentation. At this point, the law, which should be a protector, has instead become an instrument of discipline and criminalization. This is no longer just an agrarian or energy conflict; it is a real narrowing of democratic space at the grassroots level.

The main knot that ties together all this injustice lies in the battle over the definition of 'public interest'. Is public interest synonymous with National Strategic Projects? Do these projects automatically represent the voices of small-scale fishermen, horticultural farmers, or women (Bundo Kandung) who hold customary rights? Or has the public interest been reduced to macro ambitions that sacrifice lives at the micro level? If this question is ignored, then every new permit will only be a new chapter of the same oppression, giving birth to a fragile "false peace." Through live notes in the following chapters, this book takes a firm stance: development cannot be separated from ecological

justice and participatory democracy. Customary land is not merely an economic commodity, but the foundation of identity. If the state wants to continue chanting the mantra of energy transition, then what must be transitioned is not only the energy source, but also the decision-making process. Starting from centralization to participation, from repression to deliberation, and from exploitation to justice. Let us walk this quiet path together with the people who continue to persevere.

CHAPTER II

ENERGY HEGEMONY AND RESISTANCE AT THE FOOT OF THE MOUNTAIN



A Deceptive Calm

By: Amelia Lestari

The village of Batu Bajanjang, Lembang Jaya subdistrict at the foot of Mount Talang, Solok Regency, West Sumatra, appears peaceful at first glance. The agricultural fields remain green, irrigated by mountain water, and residents still go to their fields as usual. However, behind this seemingly normal routine, an atmosphere of “eerie calm” envelops the village, which is one of West Sumatra’s food baskets.

Since the central government designated a 27,000-hectare Geothermal Working Area (WKP) for PT Hitay Daya Energi in 2017, social life in the Salingka Mount Talang area has slowly fractured. The mountain, which the indigenous Minangkabau community has long revered as the “peg of the earth” and “water tower,” has now become a battleground between the extractive economy and the agrarian economy that has sustained the residents. Amidst these changes, the community faced the threat of losing their water sources, which were the lifeblood of irrigation for hundreds of hectares of horticultural land, while also being forced to confront the state’s response

to their rejection, which ignored the voices of the customary rights holders.

On November 20, 2017, tensions in Nagari Batu Bajanjang erupted when heavily armed officers were deployed to escort the company's survey, triggering clashes and the burning of one of PT Hitay Daya Energi's operational vehicles. The state's handling of the incident led to the arrest and prosecution of three residents (Ayu, Edi, and Kacak), seen as a form of criminalization to silence opposition to the Gunung Talang PLTP project. Since that incident, the dynamics of the conflict have entered a new phase, no longer one of explosive anger but rather one of a fragile calm layered with fear and suspicion.

The market and lapau (small shops) still operate as usual, but the once warm tradition of maota has now turned cold and rigid. People are careful in their choice of words, lowering their voices and observing each other before speaking. They are aware that among the rows of chairs and coffee cups, there could be a "village spy" from a neighboring village who has sided with the company or a local intelligence agent assigned to monitor the activists' every move.

The calm slowly turned into suffocating psychological pressure. Around the home of Ayu Dasril's family, victims of criminalization who became the basis of resistance, the community reported an increasingly intense pattern of surveillance. Foreign vehicles without license plates repeatedly passed by at odd hours, while unknown people photographed

residents' homes without introducing themselves. Every sound of an approaching car triggers a spontaneous reflex; doors are immediately locked, and conversations are abruptly stopped. In that silent living room, calm turns into a new form of violence, a deprivation of safety and freedom from fear, rights the state is meant to guarantee.

On the other hand, social damage occurs. Residents are divided into pro and anti camps. The kinship network, which has been strong in the matrilineal Minangkabau tradition, is torn apart by the politics of divide-and-rule practiced by company intermediaries. Those who chose to side with the company and act as informants were gradually excluded from the traditional social sphere. This fragmentation was painful, but at the same time, it gave birth to a "solidarity of pain" among the groups that chose to persevere, especially the families of those who had been criminalized.

However, the tense calm did not completely paralyze the residents' lives. Amidst the politics of fear, they developed a new, more measured form of resistance. The Parik Paga Nagari youth group now acts as a rapid documentation and communication team, recording every movement of foreign vehicles with cell phones, while also carrying out blockades when circumstances require it. From their seemingly ordinary homes, they establish a clear emergency communication chain, determining who to contact in critical situations and how to prevent information from leaking to the village's spy network.

At the forefront stood the Bundo Kandung, the women who hold rights to communal land in the Minangkabau matrilineal system. They consciously used their bodies as a barrier to block officials and heavy equipment from entering the Nagari territory. They exploited the moral burden of officials who were hesitant to use physical violence against women, while also asserting that they were the rightful owners of the land.

On the slopes of Mount Talang, tranquility also masks ecological threats. Participatory mapping by residents shows that the markers for the geothermal working area (WKP) are planted within the protected forest area, which serves as a water catchment zone and the heart of the irrigation system that sustains the agricultural land below. From the planned drilling site, water flows directly into rice and horticultural fields, contradicting the “idle land” narrative in the Environmental Impact Assessment (EIA) document. Given that Batu Bajanjang is inhabited by prosperous farmers who are self-sufficient and do not depend on social assistance or CSR programs, this geothermal power plant project has the potential to impoverish them by destroying their main sources of production: water and fertile soil.

In one of the closed discussion sessions, a bundo kanduang (female leader) summed up their concerns with the following statement:

“Aia ko darah kami. (This water is our blood). If the mountain is drilled, our rice fields will die, and

so will our children and grandchildren. We don't need compensation; what we need is water to live."

Behind these calm words lies a threat: for them, losing their land means losing their identity, their history, and the future of their children and grandchildren.

This shows that the conflict on Mount Talang is not merely a dispute over project permits, but rather a series of causes and effects that began with a top-down policy of issuing Geothermal Permits without genuine FPIC, which then spread to have ecological, social, and psychological impacts on the community. Patrols by the authorities, the criminalization of community leaders, and communication with the village and sub-district governments have created a condition of "false peace" that closes off democratic space. On the surface, physical clashes have begun to subside, but beneath, a sense of threat runs high, ready to peak at any moment when the residents' bodies are once again forced to become the last line of defense to protect their water towers of life.

The calm in Batu Bajanjang is actually an alarm that continues to sound softly. Behind the green fields and the seemingly peaceful village, there is a village that is on guard, taking notes, and fighting while holding its breath.



The Silent Battlefield of Batu Bajanjang: When Investment Cuts the Lifeline

By: Fitria Deswika

On the slopes of Mount Talang, specifically in the village that encompasses Batu Bajanjang, harmony is no longer the right word to describe the residents' lives. Since PT Hitay Daya Energy marked the geothermal energy coordinates there, an imaginary demarcation line has divided the village. This is not just a land dispute, but a cold war between brothers that has changed the usually egalitarian sociological map of Minangkabau into fragments of mutual suspicion.

If you walk through the market or sit in a lapau (coffee shop) today, you will see a strange sight. Some tables never come together; greetings are deliberately swallowed back. The community has become extremely polarized into two factions: the guardians of customary land and those considered to be corporate stooges.

For the second faction, life in the village now feels like being imprisoned in an open space. In Minangkabau, social

sanctions are a bloodless execution. These social sanctions take the form of boycotts in death rituals and wedding celebrations.

When death occurs, the sacred tradition of paying respects has become a political weapon. When a family member from the pro-corporate camp dies, deafening silence greets the house of mourning. No neighbors come to bring shrouds, no hands help dig the grave. Here, betrayal of the collective living space is paid for with eternal neglect.

Similarly, when a wedding takes place, the banquet table can be empty. Wedding celebrations, which should be gatherings for socializing, turn into monuments to loneliness. Invitations are sent out, but no one is willing to cross the threshold of a house considered to have accepted "bribe money."

This conflict has also triggered the most severe crisis of traditional leadership in decades. The Niniak Mamak and Nagari officials, traditionally seen as the big tree that provides shelter, have now lost their dignity.

Because they had been the gateway for the interests of local political elites and corporations in 2017, these leaders are now like paper tigers. They still hold their titles, but have lost their audience. The community's absence from the traditional events they lead is the most obvious form of a vote of no confidence. People are now more obedient to the commands of groups that care about nature or grassroots movements than to the dictates of traditional authorities,

which are considered contaminated by investment interests.

This polarization has even penetrated sacred spaces. Mosques are no longer just places to commune with God, but centers of command for popular resistance. Here, politics and faith are intertwined.

When companies tried to use mosques for their socialization agenda in 2025, they made a fatal mistake. For residents, bringing the narrative of extraction into a house of worship is a reopening of wounds from past criminalization. Memories of friends who were imprisoned under SLAPP laws, even though they were not at the scene of the incident, have frozen into a collective resentment that is difficult to melt with clean energy rhetoric

However, behind the cracks in social cohesion, a new, more resilient force has emerged: the redistribution of power. This polarization has forced the most vulnerable group, women, to leave the kitchen and stand at the front lines of the barricades. They realize that if geothermal energy damages the underground aquifers, they will be the first to lose sovereignty over their domestic sphere.

Now, entering 2026, the struggle has evolved from mere physical blockades to intellectual resistance. Residents have transformed into "architects of living space." They produce counter data and conduct independent economic valuations of horticultural agriculture and hot spring tourism to show that the price of customary land far exceeds the figures offered by PT Hitay.

“The state may grant permission on paper, but it is the people who hold the permission on the land. In Gunung Talang, this social wall is too high for any corporation to climb.”

The resistance at the foot of Mount Talang is a mirror for us all, showing how high the price of development is when it tears apart a community’s social fabric. The strategic advice for the future is no longer about drilling techniques, but about restoring dignity. Without recognition of customary rights and an end to criminalization, Mount Talang will remain a silent battlefield where neighbors turn their backs on each other, and investment will stand on land that never gave its blessing.



At the Foot of Mount Talang, Prison Bars Are Not the End of Everything

By: Jenny Noviantri
That morning, Batu Bajanjang was not doing well. Behind the thick fog that enveloped the foot of Mount Talang, there was a sharp smell of shallots—the sweat of thousands of farmers who were now haunted by anxiety. The sound of machetes cutting through bushes and hoes hitting the fertile black volcanic soil was usually a symphony of prosperity. However, since the roar of PT HITAY's machines split the village in 2018, that sound has slowly turned into whispers of resistance spreading across every hut and rice field. The cold mountain air can no longer extinguish the heat generated by the conflict triggered by corporate energy ambitions.

For the residents, sovereignty is not a legal term that looks good on paper. Sovereignty is a simple but fundamental thing: hot springs that continue to flow freely into their bathtubs, and fields of potatoes and chilies that can send their children to college without the need for help from corporate iron towers. However, this agrarian sovereignty, deeply rooted for generations, is now being forced to submit to the dictates of

energy hegemony masquerading as investment.

In the midst of this exhausting struggle, the people of Batu Bajanjang are forced to witness the law's cold, impartial nature. The wound is called criminalization. Ayu Dasril became a martyr for the injustice felt by the entire Nagari. As a paralegal from LBH Padang who grew up and learned law directly from the suffering of the people, Ayu was forcibly removed from the struggle and thrown into prison for two years.

The charges of burning a company car and incitement that were levelled against her were felt by the residents as an attack on the collective pride of the nagari. In the tense courtroom, the people saw with their own eyes how the narrative was constructed, and the witnesses were presented as if for one purpose only: to lock the cell door as quickly as possible. The use of witnesses whose testimony was questioned by residents in the field demonstrated the vulnerability of environmental activists in the face of a co-opted legal system. The goal of this deterrence tactic was clear: to break the residents' spirits so the geothermal project could proceed unhindered.

However, corporations misread the mentality of the people living at the foot of the mountain. The imprisonment of one of their comrades-in-arms has become the most valid proof for residents that the system is siding with capital, not with people. The iron bars have not killed the movement; instead, they have triggered a chemical reaction of solidarity

that is stronger than ever. Luka Ayu is a collective wound, and prison is merely a waiting room for a greater resistance.

One thing must be emphasized: the resistance in Batu Bajanjang never rested on one shoulder. It was a collective struggle that had no single face. At the forefront, women such as Ibu Sur and dozens of other mothers stood like a solid wall that promises of compensation or threats from the authorities could not penetrate. Their hands, which daily sort the harvest with care, are now clenched every time one-sided socialization attempts to infiltrate residents' homes.

These women are the most sensitive. They know that if the springs are damaged and the communal land is privatized, then their kitchens and the future of their children and grandchildren are at stake. This resistance belongs to everyone, from the young men who faithfully guard the village entrance at night to the old farmers who continue to hoe despite frequent, subtle intimidation. The criminalization of one of their members is merely a spark in the larger fire of popular resistance. The pain of one resident is the pain of the entire village, and they have proven that imprisoning the body can never imprison the collective belief of an indigenous community.

The peak of this collective resilience emerged when state law was considered dead to the people's justice. When some of the indigenous elite or Ninik Mamak were tempted by the sweet promises of corporations and left their children and grandchildren to fight alone on the front lines, the grassroots

community took fundamental steps through social sanctions.

This "People's Court" operates in a tense silence. Residents completely ostracized those who were considered to have betrayed the nagari's mandate for their own gain. There were no more greetings on the streets, traditional ceremonies were boycotted, and a collective oath emerged that shook the soul: "If they die, the residents will not attend the funeral." In Batu Bajaran, losing moral legitimacy in the eyes of the people was far more painful than any prison sentence. This sanction is proof that the moral sovereignty of the people still far exceeds the supremacy of the law that can be bought. The people have taken back their social control to punish anyone who dares to mortgage the future of the ulayat for personal gain.

Through the lens of Structural Legal Aid (BHS), the conflict in Batu Bajaran is a real existential clash. On one side is the hegemony of energy companies hungry for land; on the other, the sovereignty of citizens who want to defend their living space. The patterns of criminalization through legal manipulation that we witness are evidence that the law often becomes a "hammer" for communities that dare to speak critically. This inequality is not merely a matter of legal provisions, but of a power structure that seeks to marginalize residents from their own customary lands.

Until November 2025, even though the company continues to try to sugarcoat the situation through various "sweetening" socialization efforts, the people remain

steadfast. The fog in Batu Bajanjang may obscure their vision, but it cannot obscure the historical truth that this land is not for sale. The collective struggle of the people of Batu Bajanjang is a manifesto: that Living space is not a commodity, it is non-negotiable. They will not stop until every inch of their customary land is truly free from the threat of exploitation, because for them, surrendering the land means surrendering their future.

This village still awaits substantive justice. However, as long as the fire of solidarity still burns in residents' homes, as long as the voices of rejection still echo in the Friday Market, the sovereignty of Batu Bajanjang can never be bought with a handful of investment rupiah. They are living witnesses that iron bars can imprison bodies, but they will never be able to stop the steps of a village that wants to be free on its own land.





Living Space In The Shadow Of Geothermal

By:

Mhd. Qori Al-Karim

Bonjol is surrounded by agricultural land and plantations, and the community lives in a rhythm that has been in harmony with nature and customs for many years. The land is not just an expanse to be cultivated or inherited, but a living space integrated with the identity of the people in Bonjol society's customary system. The land of Bonjol is a space for generations to grow, for deliberation to take place, and for solidarity to be built through cooperation. In Bonjol, the elders are the guardians of values, while the village administration carries out administrative functions. This structure formed a relatively stable social life before the arrival of the Geothermal Power Plant Project.

The arrival of the geothermal project brought both hope and anxiety to the Bonjol community. Initially, the Bonjol community accepted the news that their area had geothermal potential that would be developed for energy. The information circulating mentioned compensation for the land at a value considered reasonable. However, over time, the news became confusing. The communicated compensation

value no longer matched what was realized in the field. The significant difference in figures raised questions among the community, especially among those who depended entirely on the land for their livelihood.

Conflict arose when the land acquisition process proceeded without the community's full involvement in equal deliberation. Some residents claimed they had never received a complete explanation of the project's objectives, implementation stages, or potential social and environmental impacts. Information was mostly provided through notifications rather than dialogue. In this situation, the Bonjol community, as the owners of the living space in the development, found themselves in a weak position. They were directly affected, but were not fully involved. Tensions escalated when residents' attitudes diverged.

Some choose to accept the sale of land for pragmatic reasons, while others refuse because they feel the price is unfair and the process is not transparent. In this dynamic, the relationship between the community and the *niniak mamak* has shifted. Some residents feel social pressure to follow the decision to sell the land. The threat of exclusion, concerns about social consequences, and even fear of administrative repercussions for family members who work in the nagari administration loom large over their choices. What was initially an administrative conflict has turned into a social conflict that affects kinship relations.

The social fabric of Bonjol, which had previously been

supported by deliberation and trust, began to fray. Social capital, such as mutual assistance and community solidarity, was no longer as strong as it had been before. The village administration, which was expected to serve as a conduit for information and a protector of citizens' interests, was seen by some community members as playing a greater role in facilitating land acquisition. Meanwhile, the company implementing the project became an actor with far greater economic and structural power. It was this imbalance of power that deepened the community's sense of powerlessness.

In the course of events, the Bonjol community did not immediately engage in open resistance. Instead, their response tended to be passive and forced. Many residents ended up selling their land not because they fully agreed, but because they felt they lacked sufficient information, did not fully understand their rights, or had a weak bargaining position. This acceptance reflected desperation rather than conscious consent. This is where the conflict reached its most subtle point, not in a large explosion of protest, but in the gradual weakening of the collective courage to speak out.

Amidst these conditions, field activities conducted to understand the community's situation found that the main problem was not only the compensation value, but also the lack of meaningful participation. The lack of socialization, limited space for dialogue, and social pressure felt by residents indicate that the development process has not been fully aligned with the principles of fairness and transparency. Technical challenges, such as damaged access

roads from flooding, are indeed physical obstacles, but social barriers, such as mistrust and community fragmentation, are far more complex. The story of the Bonjol community in the context of this geothermal project illustrates how large-scale development can transform a village's social landscape.

Land acquisition conflicts not only affect economic aspects but also shake the structures of customs and kinship relations. Customary land, which should symbolize community sustainability, has become a source of debate and division. Ultimately, this narrative is not yet complete. The Bonjol community is still in the process of rediscovering its space for participation and solidarity, which had weakened. Community empowerment is key so that they are not merely objects of development policy, but once again become subjects with a voice and bargaining power because ideal development is not only about generating electricity from geothermal energy, but also about maintaining social energy, trust, deliberation, and the dignity of the community so that they remain vibrant amid change.

The Hegemont Of Beauty The Foot Of The Mountain

By: Anisa Maharani

Mount Tandikek-Singgalang is not just a natural landscape but a meaningful space that lives in the community's collective memory. The beauty that radiates at the foot of the mountain and the benefits that the community can feel. Its beauty radiates from the green slopes and the thin fog that descends slowly in the morning, creating a quiet, sacred atmosphere. These conditions are not only beautiful to look at but also provide economic value by supporting the local community through the ecological conditions they foster.

The village of Pandai Sikek, administratively located in the Sepuluh Koto District, Tanah Datar Regency, West Sumatra, is one of the areas situated at the foot of Mount Tandikek and Singgalang. The local community's activities thrive in a peaceful atmosphere. A thin fog descends from the slopes of Mount Tandikek-Singgalang, enveloping the rice fields, farms, and houses of the residents who live in harmony with nature. The fertile soil, water flowing from mountain springs, and life proceed in a rhythm that has been passed down from generation to generation. These ecological conditions are not only beautiful, but have become part of the family that is

cared for, protected, and passed on.

The beauty of Pandai Sikek did not come about by chance. It reflects the long relationship between humans, customs, and communal land. The rice fields that stretch out are not only a source of food but also a pillar of the economy and identity. Farming, managing communal land, protecting springs, and caring for the living space that has been passed down from generation to generation. These conditions make Pandai Sikek not just a natural landscape, but a manifestation of the closeness that has grown in the lives of the community, its customs, and its environment, preserved through the values of deliberation and local wisdom.

However, behind the silence of Mount Tandikek-Singgalang, there is a threat slowly creeping in. The government, in the name of national development and the transition to renewable energy, has designated the Tandikek-Singgalang area as a potential geothermal development zone. The beauty that has long supported the local community is now seen as an energy reserve ripe for exploitation. The geothermal project comes with the narrative of clean energy, but for the people of Pandai Sikek, it is a shadow cast by the seizure of their living space. Drilling, infrastructure development, and exploration activities risk damaging soil structure, disrupting water sources, and threatening community agricultural land, which is the main foundation of the economy and can destroy the community's social identity.

This dispossession does not take place openly. It comes through policies, work area maps, and decrees that are born far from participatory deliberation with the community. The illusion of job opportunities accompanies promises of economic stability for the community, even as its voices are increasingly marginalized. When the community began to realize the real impact of similar projects in other areas (such as the Sorik Marapi PLTP in Mandailing Natal), the land became infertile, hot steam emerged from the drilling site, and the ecological balance was destroyed.

In response to impacts in several areas where geothermal energy projects have been carried out, collective awareness has grown among the people of Nagari Pandai Sikek. They came together through small discussions, typical of coffee shop conversations, which continued into traditional deliberations. The community gradually built up its opposition to this strategic project as part of its efforts to defend its living space.

The community's rejection in Pandai Sikek was not a spontaneous reaction that happened overnight, but rather the result of a long process of reading the situation, understanding the threats, and realizing the power imbalance between the authorities, corporations, and the Nagari community. The billboards of rejection that appeared at several points in Nagari Pandai Sikek were not merely symbols of resistance, but also a warning sign that the national strategic renewable energy development project should not come at the cost of environmental destruction.

In response to the threat posed by the strategic geothermal energy project, collective awareness and local community efforts to influence political decision-making led to various efforts to defend the community's living space. Advocacy was carried out at the local government level, in the hope that their voices would be heard and considered. Letter after letter was sent, aspiration after aspiration was conveyed. However, what they repeatedly encountered was emptiness, the silence of the bureaucracy, and the indifference of the state, which seemed unable to budge from its position.

In this context, the beauty of Pandai Sikek becomes a paradox: it is revered as a source of energy, but ignored as a living space. The state seeks to seize it through biased policies, while the community struggles to defend it through organization, solidarity, and structural legal assistance. Pandai Sikek is not merely a conflict zone, but a mirror of how development that ignores ecological justice can become structural violence. At the foot of Mount Tandikek-Singgalang, natural beauty is now not only to be cared for, but also to be fought for.





CHAPTER III

LAND THAT IS SEIZED/ A CARCASS COVERED IN HONEY



Honey-Wrapped Carcass on the Border of Three States

By:

Dita Indriani Siregar

Located between the two natural giants of Kerinci and Bengkulu, the ridge of Gunung Kerinci Seblat National Park towers in the east, and the sloping lowlands of the western coast, clear rivers flow through the land, bringing life and prosperity. The Tapan River waters the land that has long been a source of life, winding and stretching to the southern tip of Pesisir Selatan Regency, West Sumatra: Tapan. A land that holds a million natural treasures with a well-preserved traditional rhythm.

The community remains bound by strong traditional ties under the umbrella of four major ethnic groups: Melayu Gadang, Melayu Kecik, Chaniago, and Sikumbang, who have passed down the guardianship of ancestral lands as heirlooms and spaces for life. The daily lives of the people are filled with the harmony of cooperation and respect for customs that are still deeply ingrained, creating the image of a land that appears stable and "fine." But don't be fooled by the stunning landscape and the riches hidden within.

These words were spoken by Amir Syam, a paralegal who

has spent 15 years fighting, struggling, and speaking out against the injustices caused by greed that has harmed many people. He assesses that Tapan's condition is only superficial. "So far, only the outer layer of Tapan has been visible," he said, beginning an in-depth conversation about other hidden issues in the Tapan region. The peace in Tapan today is only an illusion. Behind the sprawling rice fields and abundant plantation harvests lie agrarian conflicts and environmental destruction, which he describes with a sharp metaphor: like "a carcass covered in honey and smeared with musk oil."

The stench inside, eating away at the justice that should be the right of the people, is polished as beautifully as possible so that outsiders do not detect the peaceful life and appearance of a prosperous society. It is ironic because its wealth hides many wounds that eventually rot and turn into scattered carcasses, becoming a field of greed, breaking brotherhood, and fostering fear. This land, full of sources of livelihood, has become an addiction for the caterpillars that feed on the carcasses of greed, causing destruction that destroys the welfare of the community.

The prolonged wounds that have yet to find an end in Tapan began with a signed agreement 29 years ago, in 1997. At that time, PT. Citalaras Cipta Indonesia (CCI) came not as an invader, but bearing "honey" in the form of promises of prosperity for the agrarian community in the southern tip of West Sumatra. Through the Tapan Village Cooperative (KUD), a partnership agreement was established with a scheme that sounded fair and promising. The company would

build a plasma plantation covering approximately 1,280 hectares, intended to build a prosperous life by absorbing labor from the local community as compensation and social responsibility for the customary land that was handed over to become a core plantation, which ultimately ended in betrayal.

On paper, the 40-60 profit-sharing ratio between the company and the community painted a bright future for the community's economic development. The residents envisioned a future where their ancestral land would not only sustain them but also provide prosperity for their children and grandchildren through palm oil, offering a way out of the structural poverty that had long plagued the village.

However, this vision has taken a wrong turn and become a promise that has never been fulfilled. Twenty-nine years have passed since the agreement was signed. Still, the promise has been turned on its head, blown away like dust in the wind, prolonged by the arrival of other parties as investors without notification or consultation with the community members of KUD Tapan. It is a beautiful sight, but the customary land has been unilaterally taken over. At the same time, the community inherits a protracted legal conflict over the fulfillment of sweet promises that have never been kept. Efforts to hold joint discussions between the two parties never materialized, with every invitation to resolve the issue being denied and evaded. However, the company's core land continues to emit smoke from the factory chimney, and dust from large trucks transporting palm oil plantation products colors the blue sky of Tapan.

On the same stage, several communities in the forest interior have quietly opened up gold-mining areas to supplement their livelihoods. The profits from panning, which still uses makeshift tools, and the tempting results spread by word of mouth among those who know about it have attracted other communities to try their luck in the interior of the mountain range. Initial reports of gold panning profits reaching 100 million rupiah attracted people to try their luck with the same hopes. The location, 10 kilometers away and accessible only by a two-hour walk along a makeshift path into the forest, did not deter those seeking lucrative income. What started as a small group grew into several groups with the same intention: to enter the forest interior with makeshift equipment. One of the people we met said that information about gold mining activities spread by word of mouth, and that the results were very tempting for supplementing family income. "If I had unlimited access to the location, I would also go into the forest to help the family economy."

Illegal and unstructured mining activities will have long-term impacts on the forest ecosystem, including landslides, contamination of mountain water quality, and concerns about future impacts from former mining areas if they are not properly managed.

In early January 2026, the police conducted patrols and confiscated gold mining equipment found in the mining area, but the illegal miners were not found. The police then cordoned off the location for security and conducted regular patrols. Despite being detected by authorities and the

presence of patrols in the area, some groups have not been deterred from continuing their mining activities and now operate secretly at night to evade the police.

Another wound has sprung up and is clearly visible in the land of Tapan: deforestation upstream has become the beginning of a series of disasters slowly eroding residents' lives. The green hillsides are now bare and vulnerable, leaving dry, erodible land that will be washed away every time the rainy season comes. When the rain gives the land no respite to breathe, there is nothing left to absorb the rainwater into the ground. Flash floods suddenly flow, carrying tree trunks from deforestation and mud, submerging settlements and farmland, reminiscent of the old wounds that still gape from previous years. "The floodwaters inundated people's homes without warning, without preparation," said Amirsyam, describing the condition of his house during the floods several years ago.

The river's clarity slowly sinks beneath the mud, the water overflowing, ready to submerge the rice fields of residents along the riverbanks. The lush expanse of rice fields, which had almost turned golden yellow, was covered in mud, resulting in a failed harvest before the farmers could enjoy the fruits of their labor. For the farmers of Tapan, mudslides are not just a natural disaster, but a recurring wound to their livelihoods.

This damage does not stand alone. Behind the chainsaws upstream stand large-scale economic interests that view

forests only as numbers and profits, not as the foundation of life. The river, which is a source of water, irrigation, and support for the rice fields for the residents, is forced to bear the burden of the greed above it.

The residents realize this change not from stories, but from the increasingly fragile waterways before their eyes. The water seems reluctant to return to its clarity, the currents are increasingly wild, and floods no longer knock; they come repeatedly. Rice fields that used to be sufficiently fertilized and irrigated now have to be cleaned of layers of mud, with results that no longer match the effort put in.

For the people of Tapan, the forests upstream are not just losing their trees, but the old bond between humans and nature is cracking. When the forest is no longer a shield for life, the people downstream are the first to pay the price for the damage without ever being consulted, let alone asked for their consent.



Behind Bars in Their Own Land, the Irony of Kapa Farmers Awaiting Justice

By:

Fadhilatul Husni

Lidya Dwi Utami

That morning, it was not the chirping of birds that greeted us, nor the rustling of the wind blowing through the palm fronds. Instead, it was the long wail of sirens that broke the silence of the Kapa farmers' fields. **"At 10 a.m., we were arrested and forcibly taken away. I resisted, but they dragged me away anyway. They even slapped me. We weren't even allowed to urinate on the road. The sirens kept blaring, as if we were terrorists,"** said Ibu Ica with teary eyes when we met her on Thursday (1/15/2025).

Ibu Ica, a middle-aged woman we met upon our arrival in Nagari Kapa, began to pour out her pain. She is one of many residents who have been victims of criminalization as the conflict escalates. At that time, the national media was abuzz with reports of the authorities' repressive actions against the Kapa farmers. In the same fields, on the land that still bears the traces of their sweat, the residents just want to survive. They planted food crops for a plate of rice on the table. However, the presence of the authorities overturned

their sense of security. Farmers, who should have been seen as food heroes, were instead treated as a security threat.

“We are just trying to make a living. We are not criminals,” said Mrs. Ica. This statement was not merely a defense but a cry from the heart, perhaps too simple for the large institutions above to understand. The root of this dispute dates back to 1997. The customary land of Nagari Kapa, which had been handed over to the state, changed status to a Cultivation Rights Title (HGU). The land was given to PT Permata Hijau Pasaman I (PT PHP I), part of the Wilmar Group. The change in status of the customary land to HGU was allegedly not communicated transparently to all the descendants. The community felt that the process was carried out unilaterally by the State without consultation involving all elements of the nagari. Suddenly, the ancestral land was transferred to a corporation’s control.

The indigenous community, whose livelihoods depend on corn and banana crops, was shocked. They lost access to their living space. The sweet promise of a plasma plantation with a fair profit-sharing scheme has not been realized. This inequality has given rise to structural injustice, with the company becoming increasingly powerful and controlling thousands of hectares of land. At the same time, the original customary landowners have been marginalized in their own homeland. This struggle had actually borne fruit on the international stage. In May 2017, the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Complaints Panel issued a ruling in favor of the Kapa community. At that time, the RSPO

acknowledged the violation of customary land rights and ordered the Wilmar Group to cease activities on the disputed land until a fair agreement was reached.

For the residents, this ruling several years ago was the world's recognition of their rights. However, this victory on paper seemed to evaporate into thin air. Instead of continued dialogue in accordance with the international mandate, the residents were once again faced with a security approach in the field. Hope blossomed again in 2019. The Pucuk Adat (traditional leaders) stated in an open forum that the company's HGU (right to cultivate) had expired and would not be renewed. For the Kapa community, this statement provided moral legitimacy to resume managing their customary land. Since 2020, farmers' hoes have been swinging again, trying to weave hope on the 483 to 600 hectares of land. However, the state responded to this effort to "return to their homeland" not with dialogue, but with a security approach.

The conflict reached a boiling point in 2024. The atmosphere in Nagari Kapa became tense. The police were intensively present, creating an atmosphere of intimidation in the middle of the fields. The climax occurred on October 4, 2024, when forced evictions were carried out. Residents' crops were flattened, work huts were destroyed, and the roar of heavy machinery drowned out the cries of the farmers' wives. The West Sumatra Regional Police moved quickly to secure around 11 residents who were accused of being "provocateurs."

Now, the landscape in Nagari Kapa has completely changed. Access to the disputed land seems to be tightly closed off, fenced in by strict surveillance that makes it difficult for anyone to see the truth up close. When we tried to reach the location, an invisible barrier seemed to stand tall, confirming that the land is now off-limits to its original owners. The farmers who were once free to hoe and sow seeds of hope can now only look on from a distance. Gazing at the fields is now like staring at a foreign fortress, a strictly guarded living space, as if it holds secrets that the public eye must not touch. This access restriction is the most tangible symbol of the loss of residents' sovereignty; they are now like guests expelled from their own homes.

The Padang Legal Aid Institute (LBH), which has been assisting the community since the company's replanting plan emerged, asserts that what has befallen the Kapa farmers is a clear form of criminalization. "LBH began active assistance in 2024, both through litigation and non-litigation. The community is merely trying to defend their customary land from the expansion of PT PHP I," said Jalal from LBH Padang on Friday (February 13, 2026).

According to Jalal, the legal process against the 11 residents has now entered a crucial stage in court. After a series of investigations by the police and prosecutors, the farmers are now awaiting the prosecutor's indictment, scheduled for the upcoming hearing. After the indictment, the farmers will present their defense (plea) before the judge finally delivers the verdict. For the residents of Kapa, this

verdict is not just a matter of freedom or imprisonment, but rather the state's recognition of their rights that have been stripped from their ancestral lands.

"We believe that the indigenous people of Nagari Kapa are not criminals. They are citizens defending their living space. We hope that the court will truly deliver a fair verdict by looking at the causes and effects of why they resisted," concluded Jalal. Now, amid the silence that envelops the fields they can no longer tread on, the hopes of the residents of Kapa rest solely on the judge's gavel. Ibu Ica and the other residents are not asking for much; they just want to hear the birds singing in their own fields again, without the fear of sirens that could break the morning silence at any moment, because for them, land is not just a commodity, but the breath of life that should not be caged.





CHAPTER IV

GRAY SKIES ON THE COAST



GRAY SKIES ON THE COAST

By: Ady Fakhrol Rozi

The city of Padang is located in West Sumatra Province, directly facing the Indian Ocean. Behind the beauty of Padang City, especially its coastal areas, lie polemical issues. One example is the problem faced by the community in the Bungus area, especially in the South, Central, and North Teluk Kabung areas in the Bungus Teluk Kabung District, due to the presence of the Teluk Sirih Steam Power Plant (PLTU).

The existence of the Teluk Sirih PLTU, which has been operating since 2014, has elicited various responses and reactions from the community in the Bungus area, with some responding positively and others negatively. Some argue that the PLTU has improved access roads and transportation to the Bungus area, making them easier and smoother, and has also created job opportunities for the surrounding community. However, opponents of the PLTU argue that its operation harms the Bungus area, especially Teluk Sirih, in the long run. The PLTU harms the environment and the community surrounding it. Issues that are often raised include air pollution from exhaust emissions, pollution of seawater

around the PLTU, damage to coastal ecosystems, and threats to fishermen's livelihoods.

In addition to environmental issues, the existence of the Teluk Sirih PLTU has also caused social conflicts between the community and the management and government, such as a lack of transparency in the planning process, minimal involvement of the surrounding community in decision-making, and differences in interests between economic development and environmental protection, which are the main factors that have exacerbated the situation surrounding the existence of the Teluk Sirih PLTU. The problems at the Teluk Sirih PLTU have existed since the construction and land acquisition processes to establish the Teluk Sirih PLTU. In fact, land disputes and compensation issues have been ongoing since 2008 to 2014, where there are allegations of manipulation in the process of land ownership inventory and the designation of protected forest areas for the PLTU location, involving officials from the Padang City Government, the Sub-District Government, the Village Government, and even the Head of KAN.

Behind all the problems plaguing the Teluk Sirih PLTU, the community in Bungus, especially in the Teluk Sirih area, continues to voice their complaints about the PLTU's presence in the middle of their community. The community continues to cry out about how their area, which was originally abundant with fish and sea, which were the livelihood of the wider community, but with the establishment of the power plant, the fish that were originally abundant in the Teluk Sirih

area are now very few and not even enough for daily needs due to the polluted sea.

The community continues to express its discomfort regarding the transportation of coal from the power plant, which has been passing through the roads since 2021. Before 2021, coal was transported by sea. However, there has been a drastic change: in 2021, coal transportation now uses land routes, with large trucks passing through residential areas in Bungus, causing anxiety and fear among the community due to the risk of accidents and danger to children playing and crossing these roads.

Controversy and incidents continue to surround the Teluk Sirih PLTU. In 2020, a fisherman was sucked into a water intake machine, prompting Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) to demand accountability from the PLTU. Then, in 2022, a massive fire broke out at the power plant, engulfing the belt conveyor. This incident killed one occupational safety and health (K3) worker due to an accident during the firefighting efforts, with the suspected cause being sparks from coal material.

The people of Bungus, especially Teluk Sirih, have voiced their complaints to local officials. Still, the local officials have acted as if the people's voices do not exist and have pretended that everything is fine. At the same time, the community continues to suffer and experience negative impacts on all aspects of life in Bungus, especially those who depend on traditional fishing for their livelihoods. If the

sea is polluted by waste from the power plant, how can the community continue their lives if their source of livelihood is increasingly damaged?

Traditional fishermen recount that in 2016-2017, fish catches in the Sirih Bay area were still abundant, with fishermen even catching around 500 kilograms in a single night. However, fishermen's income from fishing has declined significantly over the past four years. In 2024, fishermen in Teluk Sirih can no longer depend solely on the sea for their livelihood. In fact, in one trip, fishermen can only bring home two kilograms of fish. Teluk Sirih fishermen say that income from the sea is now uncertain. Although there have always been seasons, fishermen can no longer predict the sea's condition.

Behind the Padang City government's ambitious drive to continue developing and finding ways to meet electricity needs, a small segment of the community remains powerless, suffering, and oppressed. While it is the duty and obligation of all governments to protect all their citizens, what if the government itself is the main actor oppressing and causing suffering to its people?

CHAPTER V

REFLECTION

From upstream to downstream, from the mountains to the coast, we witnessed a consistent pattern of oppression: the poverty and suffering of the people is not a natural fate, but the result of structural impoverishment. It is becoming increasingly clear that what we are witnessing today is a new phase of extractive conflict in West Sumatra. A phase in which violence is not always visible but is embedded in social relations; in which energy transition and industrial expansion are progressing much faster than the recognition of indigenous peoples' rights. This live-in experience has shattered our intellectual complacency, forcing us to see with our own eyes that behind the rows of investment figures, there are lives, histories, and living spaces that have been sacrificed.

At the same time, this article also proudly notes that communities have never been passive. Amidst hegemonic pressure, resistance has transformed from mere physical blockades into the production of counter-knowledge and critical readings of development narratives. This ranges from independent documentation, community consolidation,

strengthening women's solidarity, to legal advocacy efforts. They not only protect the land, but also preserve memories, affirming that customary land is not merely an economic asset, but the foundation of identity, kinship relations, and generational continuity.

The writings in this book would never have come into being without the generosity of the people who were willing to share their living space with us. We bow our heads and express our deepest gratitude. We pay our highest respects to Bundo Kandung, to the Mamak, and to our relatives who lent us the courage to fight. Despite trembling legs, scorching heat, restrictive laws, and threats to our lives, we continue to fight and remain rooted in our ancestral land. Thank you to the community, the "true architects," who have given us the courage to fight together.

To those who formulate policies behind air-conditioned desks and government buildings: the fundamental question is no longer simply whether development will continue, but how it is carried out, for whom, and at whose risk? As long as living space is treated as an object that can be negotiated without free and equal consent, we declare: not an inch of the land where we farm our fields has the right to be taken away! Oppressive policies are a betrayal of the people.

So, don't expect the suffocating coal dust, the heat of geothermal energy that melts culture, the greed of palm oil that sucks up water in arid land, and the bulldozers that erode

our ancestral land to be able to run free without resistance. When justice can no longer be found in the green courtroom, we will defend this customary land. The women who resist, the children who grow up in smoke, the youth who persevere, and the elderly will never surrender this inheritance.

Behind the still-green fields and the still-rippling sea, there is a community that watches anxiously but refuses to give up. This book is not a tombstone of sadness over defeat, but an open invitation to resistance. This writing opens up a space for re-reading that justice cannot be measured only by the fulfillment of administrative procedures, but by the extent to which the community is respected and protected. Finally, let us believe in our hearts: faith is to protect, speech is to oppose, and walking is to resist.

Like the lyrics of the song Hindia, "Imagine if we didn't give up." That is who we are. We are people who refuse to give up under an iron fist and sweet promises of prosperity wrapped in the carcass of extractivism. The government must seriously re-read that the essence of development is an empowered society. As long as living spaces are treated as objects to be seized, conflict will continue to find its form. However, we will continue to close ranks, forge solidarity, and make resistance a culture. Whether in silence or in an unstoppable loud voice, our destination is only one word: RESIST!!!

Sumatera Barat bak sebuah rumah gadang yang sedang dikepung oleh badai ekstraktivisme. Dari lereng Gunung Talang hingga kaki Tandikek-Singgalang, dari hamparan rimba hingga pesisir Kota Padang, ruang hidup masyarakat sedang diiris secara perlahan. Kita menyaksikan satu pola yang terlalu konsisten untuk disebut sebagai kebetulan: proyek-proyek datang dengan wajah legal dan bahasa kemajuan, namun meninggalkan residu sosial, ekologis, dan psikologis yang tak pernah sungguh dihitung sebagai biaya pembangunan.

